

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PELAKSANAAN KOORDINASI CAMAT DENGAN KEPOLISIAN DALAM
MENGAMANKAN KENAKALAN REMAJA DI KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



VIVI OKTAVIANI PUTRI

NPM : 157110128

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2019

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang di tulis dalam bentuk skripsi ini dapat di selesaikan.

Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”** ini penulis tulis dan di ajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang di tetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin di temukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca

Penulis menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau bersama Bapak Dr.H.Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Hendry Andry, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan usulan penelitian ini.
3. Seluruh Dosen dan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Yang teristimewa penulis ucapkan terimakasih untuk di persembahkan kepada orang tua tercinta Ayahanda Sudirman dan Ibunda Eldasriati dan juga untuk kakak saya tersayang Novi Yulia Suriati S.Pd yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya.
5. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada Winda Utari, Siswita Wundari,Selvia Dewi Karin, Thalia Miranda Sarosa, Resti Oktavia, Dan Lidia Sagitra. Serta teman-teman seangkatan 2015 Ilmu Administrasi Publik Kelas D yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau itu di balasi dengan rahmat dan karunia yang setimpal amin...

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, Desember 2019

Penulis,

Vivi Oktavianti Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian	15
2. Kegunaan Penelitian	15
BAB II :STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	16
A. Studi Kepustakaan	16
1. Konsep Teori Administrasi.....	16
2. Konsep Teori Organisasi.....	19
3. Konsep Teori Manajemen.....	20
4. Konsep Teori MSDM	22
5. Konsep Teori Koordinasi.....	23
6. Konsep Teori Komunikasi	28
7. Konsep Teori Pelaksanaan.....	30
B. Kerangka Pikir	33
C. Hipotesis	33
D. Konsep Operasional	34
E. Operasional Variabel	37
F. Teknik Pengukuran	38
BAB III : METODE PENELITIAN.....	44

A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Populasi Dan Sampel	44
D. Teknik Penarikan Sampel	46
E. Jenis Dan Sumber Data.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	48
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	49
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	50
A. Gambaran umum kabupaten siak.....	50
B. Gambaran umum kecamatan tualang.....	53
C. Visi dan misi	58
D. Keadaan pegawai kantor kecamatan tualang.....	59
E. Tugas dan fungsi.....	63
F. Sarana dan prasarana.....	74
G. Struktur organisasi	75
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
A. Identitas responden	76
1. Jenis kelamin.....	76
2. Umur	77
3. Pendidikan.....	78
B. Hasil penelitian dan pembahasan.....	79
1. Komunikasi	79
2. Kesadaran pentingnya koordinasi.....	91
3. Kompetensi SDM yang terlibat	103
4. Kesepakatan, komitmen,dan insentif koordinasi	115
5. Kontinuitas perencanaan.....	127
6. Rekapitulasi.....	138
BAB VI : PENUTUP.....	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran	143
DAFTAR KEPUSTAKAAN	145

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
II.I	Operasional Variabel Pelaksanaan koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kecamatan Tualang Dari Kenakalan Remaja Di Kabupaten Siak.....	37
III.I	Jumlah Populasi Dan Sampel Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kecamatan Tualang Dari Kenakalan Remaja Di Kabupaten Siak	45
III.2	Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian.....	49
IV.1	Jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Tualang berdasarkan Desa / Kelurahan Tahun 2016	57
IV.2	Keadaan Pegawai Pada Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak dilihat dari Tingkat Pendidikan Tahun 2016	59
IV.3	Keadaan Pegawai dilihat dari Golongan / Kepangkatan	61
IV.4	Keadaan jumlah Pegawai dilihat dari Tingkatan Umur	62
IV.5	Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	62
IV.6	Sarana dan Prasarana pada Kantor Camat Tualang Tahun 2016	74
V.1	Jumlah Responden Dari Pegawai Kantor Kecamatan, Kepolisian Dan Masyarakat Di Kecamatan Tualang Berdasarkan Jenis Kelamin	76
V.2	Jumlah Responden Dari Pegawai Kantor Kecamatan, Kepolisian Dan Masyarakat Di Kecamatan Tualang Berdasarkan Tingkat Umur	77
V.3	Jumlah Responden Dari Pegawai Kantor Kecamatan, Kepolisian Dan Masyarakat Di Kecamatan Tualang Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	78
V.4.a	Distribusi Jawaban Responden Dari Pegawai Kantor Kecamatan Tualang Tentang Indikator Komunikasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	79
V.4.b	Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Pegawai Kantor Kecamatan Tualang Tentang Indikator Komunikasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	81
V.5.a	Distribusi Jawaban Responden Dari Anggota Polsek Tualang Tentang Indikator Komunikasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan	

	Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	84
V.5.b	Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Anggota Polsek Tualang Tentang Indikator Komunikasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	86
V.6.a	Distribusi Jawaban Responden Dari Masyarakat Tualang Mengenai Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	88
V.6.b	Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Masyarakat Tualang Mengenai Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	90
V.7.a	Distribusi Jawaban Responden Dari Pegawai Kantor Kecamatan Tualang Tentang Indikator Kesadaran Pentingnya Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	91
V.7.b	Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Pegawai Kantor Kecamatan Tualang Tentang Indikator Kesadaran Pentingnya Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	93
V.8.a	Distribusi Jawaban Responden Dari Anggota Polsek Tualang Tentang Indikator Kesadaran Pentingnya Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	96
V.8.b	Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Anggota Polsek Tualang Tentang Indikator Kesadaran Pentingnya Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	98
V.9.a	Distribusi Jawaban Responden Dari Masyarakat Tualang Tentang Indikator Kesadaran Pentingnya Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	100
V.9.b	Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Masyarakat Tualang Tentang Indikator Kesadaran Pentingnya Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	102

V.10.a	Distribusi Jawaban Responden Dari Pegawai Kantor Kecamatan Tualang Tentang Indikator Kompetensi SDM yang Terlibat Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	104
V.10.b	Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Pegawai Kantor Kecamatan Tualang Tentang Indikator Kompetensi SDM yang Terlibat Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	105
V.11.a	Distribusi Jawaban Responden Dari Anggota Polsek Tualang Tentang Indikator Kompetensi SDM yang Terlibat Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	108
V.11.b	Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Anggota Polsek Tualang Tentang Indikator Kompetensi SDM yang Terlibat Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	110
V.12.a	Distribusi Jawaban Responden Dari Masyarakat Tualang Tentang Indikator Kompetensi SDM yang Terlibat Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	112
V.12.b	Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Masyarakat Tualang Tentang Indikator Kompetensi SDM yang Terlibat Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	114
V.13.a	Distribusi Jawaban Responden Dari Pegawai Kantor Kecamatan Tualang Tentang Indikator Kesepakatan, Komitmen Dan Insentif Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	116
V.13.b	Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Pegawai Kantor Kecamatan Tualang Tentang Indikator Kesepakatan, Komitmen Dan Insentif Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	118
V.14.a	Distribusi Jawaban Responden Dari Anggota Polsek Tualang Tentang Indikator Kesepakatan, Komitmen Dan Insentif Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam	

	Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	121
V.14.b	Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Anggota Polsek Tualang Tentang Indikator Kesepakatan, Komitmen Dan Insentif Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	123
V.15.a	Distribusi Jawaban Responden Dari Masyarakat Tualang Tentang Indikator Kesepakatan, Komitmen Dan Insentif Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	125
V.15.b	Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Masyarakat Tualang Tentang Indikator Kesepakatan, Komitmen Dan Insentif Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	126
V.16.a	Distribusi Jawaban Responden Dari Pegawai Kantor Kecamatan Tualang Tentang Indikator Kontinuitas Perencanaan Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	128
V.16.b	Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Pegawai Kantor Kecamatan Tualang Tentang Indikator Kontinuitas Perencanaan Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	129
V.17.a	Distribusi Jawaban Responden Dari Anggota Polsek Tualang Tentang Indikator Kontinuitas Perencanaan Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	131
V.17.b	Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Anggota Polsek Tualang Tentang Indikator Kontinuitas Perencanaan Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	133
V.18.a	Distribusi Jawaban Responden Dari Masyarakat Tualang Tentang Indikator Kontinuitas Perencanaan Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	135
V.18.b	Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Masyarakat Tualang Tentang Indikator Kontinuitas Perencanaan Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	137

V.19	Rekapitulasi Analisis Tanggapan Responden Dari Pegawai Kantor Kecamatan Tualang Mengenai Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	140
V.20	Rekapitulasi Analisis Tanggapan Responden Dari Anggota Polsek Tualang Mengenai Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	141
V.21	Rekapitulasi Analisis Tanggapan Responden Dari Masyarakat Tualang Mengenai Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	142



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.I Kerangka Pikir Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kecamatan Tualang Dari Kenakalan Remaja Di Kabupaten Siak.....	33
IV.1 Bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Tualang	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar kuisisioner (untuk pegawai seksi trantib kantor Kecamatan Tualang) penelitian tentang pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenaklaan remaja di kecamatan tualang kabupaten siak	147
2. Daftar kuisisioner (untuk anggota reskrim Polsek Tualang) penelitian tentang pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ...	155
3. Daftar kuisisioner (untuk masyarakat Tualang) penelitian tentang pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	163
4. Daftar wawancara untuk kasi trantib penelitian tentang pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	171
5. Daftar wawancara untuk Ka Reskrim penelitian tentang pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	175
6. Rekap data telly penelitian tentang pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (pegawai seksi trantibKecamatan Tualang).....	179
7. Rekap data telly penelitian tentang pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (anggota reskrim polsek Tualang)	180
8. Rekap data telly penelitian tentang pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (masyarakat Tualang)	181
9. Peraturan Bupati Siak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Siak	183
10. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tualang	197
11. Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Nomor: 94/UIR-Fs/Kpts/2019 Tentang Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi	198

12. Surat Rekomendasi Riset No: 503/DPMPTSP/Non Izin-Riset/26124 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Riau, Perihal Izin Penelitian An. Vivi Oktavianti Putri	199
13. Surat Rekomendasi Penelitian Dan Pengumpulan Data No. 070/Kesbangpol/326 Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Siak.....	200
14. Surat Keterangan No: 070/Rekom-Riset/18/2019 Pemerintah Kabupaten Siak Kecamatan Tualang	201
15. Foto dokumentasi hasil observasi penelitian tentang pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	202



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivi Oktavianti Putri
Npm : 157110128
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sayasendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari di temukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhanatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Desember 2019
Pelaku Pernyataan,

Vivi Oktavianti Putri

**PELAKSANAAN KOORDINASI CAMAT DENGAN KEPOLISIAN
DALAM MENGAMANKAN KENAKALAN REMAJA DI KECAMATAN
TUALANG KABUPATEN SIAK**

ABSTRAK

Vivi Oktavianti Putri

Kata kunci : pelaksanaan, koordinasi, kenakalan remaja

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di kecamatan tualang kabupaten siak. Indikator penilaian koordinasi yang di pergunakan meliputi komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi SDM yang terlibat, kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi, dan kontinuitas perencanaan. Pelaksanaan koordinasi di maksudkan untuk mengatasi mengenai permasalahan kasus kenakalan remaja yang sudah banyak terjadi di kecamatan tualang ini. Bagaimana penanganan yang di lakukan oleh pihak kecamatan dan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja. Tipe penelitian ini yaitu survey deskriptif dan dengan menggunakan metode kuantitatif yang menggunakan data berbentuk angka. Dengan menggunakan metode purposive sampling untuk pegawai Seksi Trantib Kantor Kecamatan Tualang, anggota Reskrim Polsek Tualang dan masyarakat Kecamatan Tualang. Jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang di peroleh dari hasil wawancara dan angket, dan data sekunder yaitu data yang telah tersedia di instansi penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu menjabarkan kata Numerik dari satu variabel dengan sebaran (Distribusi) frekuensi dengan data tingkat ordinal, sebaran data Numerik di analisis berdasarkan bobot dan jumlah responden, tipe skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert di gunakan untuk mendapatkan presentase persepsi dari satu indikator, ukuran persepsi di ambil dan di analisis berdasarkan rentang pengukuran yang di rumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di kecamatan tualang kabupaten siak telah cukup terlaksana. Karena kasus kenakalan remaja tersebut dapat di tangani walaupun respon yang di berikan dari pihak kecamatan dengan kepolisian lambat. Seperti yang terdapat dalam lima indikator koordinasi yang di gunakan pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian itu sudah di laksanakan walaupun belum terlaksana dengan maksimal, sehingga berada pada kategori cukup terlaksana. Rekomendasi yang perlu di pertimbangkan yaitu agar pihak kecamatan dan kepolisian lebih meningkatkan pelaksanaan koordinasinya seperti meningkatnya dalam pemberian sosialisasi kepada remaja-remaja dan masyarakat yang ada di kecamatan tualang serta rutin melakukan razia, melakukan sidak, dan memberikan respon yang baik dan cepat terhadap laporan yang di berikan oleh masyarakat.

**IMPLEMENTATION OF CAMAT COORDINATION WITH POLICE IN SECURING
ADOLESCENCE IN ADOLESCENTS IN TUALANG DISTRICT, SIAK REGENCY**

ABSTRACT

Vivi Oktavianti Putri

Keywords: implementation, coordination, juvenile delinquency

The purpose of this study was to determine the implementation of sub-district coordination with the police in securing juvenile delinquency in Tualang Sub-district of Siak Regency. Coordination assessment indicators used include communication, awareness of the importance of coordination, competency of the HR involved, agreement, commitment and coordination incentives, and continuity of planning. The coordination is intended to overcome the problem of juvenile delinquency cases that have occurred in many districts of this adventure. How is the handling done by the district and the police in securing juvenile delinquency. This type of research is a descriptive survey and using quantitative methods that use data in the form of numbers. Using a purposive sampling method for employees of the Tualang District Section of the Tualang District Office, members of the Tualang District Police Criminal Unit and the community of the Tualang District. Types of data sources in this study are primary data that is data obtained from interviews and questionnaires, and secondary data that is data that has been available at this research agency. Data collection techniques in this study are, interviews, observations, questionnaires, and documentation. While the data analysis technique is to describe the numerical words of one variable with the distribution (distribution) of frequency with ordinal level data, the distribution of numerical data is analyzed based on the weight and number of respondents, the type of measurement scale in this study uses a Likert scale used to get the perception percentage of one indicators, measures of perception are taken and analyzed based on the range of measurements formulated. The results showed that the implementation of sub-district coordination with the police in securing juvenile delinquency in Tualang sub-district of Siak district had been quite accomplished. Because the juvenile delinquency case can be handled even though the response given from the sub-district with the police is slow. As contained in the five indicators of coordination used, the implementation of coordination between the camat and the police has been carried out even though it has not been implemented to the maximum, so that it is in the category of being sufficiently implemented. Recommendations that need to be considered are that the sub-district and the police should improve the implementation of coordination such as increased socialization to adolescents and communities in the subdistrict of Tualang and routine conducting raids, conducting spot checks, and giving good and fast responses to reports in given by the community.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama di bentuknya pemerintah itu adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban masyarakat dalam menajalani kehidupannya secara wajar. Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di pandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu penyelenggaraan otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dan profesional.

Pemerintah pada dasarnya di bentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Keamanan dan ketertiban merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa di harapkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, sebaliknya apabila masyarakat di hadapkan pada kondisi tidak aman maka akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula.

Keberhasilan pembangunan nasional tentunya di pengaruhi oleh administrasi yang di jalankan oleh negara. Organisasi tidak pernah lepas dari peran penting

sumber daya manusia, yang mana manusia merupakan suatu sumber daya organisasi yang sangat terpenting di dalam organisasi. Manusia adalah makhluk sosial dan organisasional. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berkoordinasi dengan manusia lainnya.

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 8 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi camat pasal 5 ayat 1 yang meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kampung dan kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak di laksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan,dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Camat sebagaimana di maksud pada ayat 1 juga melaksanakan tugas yang di limpahkan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud pada ayat 1, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
- b. Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat, kampung dan kelurahan
- c. Penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Salah satu tugas camat berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi camat Pasal 5 ayat 1 adalah mengoordinasikan ketentraman dan ketertiban. Untuk itu camat mampu mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi , kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan , dan setelah itu melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Kecamatan.

Dalam menjalankan tugasnya dalam mengoordinasikan ketentraman dan ketertiban, camat di bantu oleh kepala seksi trantib.

Adapun tugas Kepala Seksi Kecamatan bagian ketentraman dan ketertiban umum dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 8 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum pasal 8 ayat 3 meliputi :

- a. Membantu camat membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum pembinaan kesatuan bangsa, organisasi kemasyarakatan serta perlindungan masyarakat;
- b. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menyelenggarakan pembinaan wawasan kebangsaan, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lainnya (POLRI dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan bencana tingkat kecamatan;
- h. Melakukan kerjasama dengan seksi pelayanan umum dan seksi-seksi lainnya dalam pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pemberian rekomendasi di bidang perizinan;
- i. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan kerukunan antar umat beragama
- j. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- k. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi ketentraman dan ketertiban dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- l. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan
- m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan
- n. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya

- o. Membuat laporan pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan, dan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Dari penegasan pasal di atas, camat dibantu oleh kepala seksi ketentraman dan ketertiban dalam melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah serta kepolisian dan pemuka agama untuk melakukan tugas sebagai kewajiban yang di berikan pemerintah daerah kepada kecamatan untuk melakukan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani, adil, makmur serta beradab berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, perlindungan, mengayomi dan pelayanan kepada masyarakat di lakukan oleh POLRI sebagai alat negara yang di bantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

Ketentraman dan ketertiban merupakan suatu kebutuhan batin dan lahirian setiap individu, demi tercapainya ketentraman dan ketertiban dikalangan masyarakat tentunya harus ada pengaturan yang di lakukan oleh pemerintah kecamatan. Camat sebagai pemimpin kecamatan harus mengkoordinasikan seluruh aspek pemerintahan yang di pimpinnya agar terwujudnya ketentraman dan ketertiban terutama di bagian kenakalan remaja.

Koordinasi di perlukan untuk proses mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik di antara kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan fisik maupun kegiatan rohaniah. Koordinasi merupakan aspek penting demi tercapainya suatu tujuan, dan setiap unsur dan pihak yang ada didalam sebuah organisasi harus mengerti dan memahami mengenai koordinasi.

Koordinasi adalah perwujudan dari pada kerjasama, saling membantu dan menghargai, menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Organisasi di dalam objek organisasi dapat di katakan sebagai sebuah proses saling mengerti antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal. Proses yang harus di jalani agar suatu kegiatan dapat di laksanakan dengan lancar ataupun jika ada masalah tidak terlalu banyak kesulitan untuk mengatasinya.

Dalam melakukan ketentraman dan ketertiban banyak pihak yang terlibat, karena masalah ketentraman dan ketertiban ini adalah kewenangan dari pemerintah. Adapun tujuan dari pemerintahan adalah untuk melindungi kepentingan semua masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan koordinasi dalam mengamankan kecamatan tualang ini di bidang ketentraman dan ketertiban umum terutama dari kenakalan remaja maka sebagaimana yang telah di maksud melalui Peraturan Bupati Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi kasi trantib pasal 8 ayat 3 camat yang dibantu oleh kepala seksi ketentraman dan ketertiban melaksanakan kegiatan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi lain (POLRI dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun SOP pelayanan penyidikan dikapolsek Tualang adalah :

1. Penyidik/penyidik pembantu pada saat menerima pengaduan dari masyarakat segera dapat menentukan apakah pengaduan itu merupakan perkara pidana atau bukan
2. Kepada pengaduan di berikan surat tanda lapor di sertai dengan memberikan kartu nama penyidik/ nomor telepon yang dapat di hubungi.
3. Setelah lapran polisi di buat, saat itu juga penyidik pembantu meneliti dan mendiskusikan dengan team yang telah di tunjuk, klasifikasi perkara di laporkan apakah kasus sulit, sedang atau mudah
4. Setelah klasifikasi kasus di tentukan, bundel laporan polisi di masukkan kedalam map merah untuk kasus sulit, map kuning untuk kasus sedang, dan map hijau untuk kasus mudah.
5. Satu hari setelah laporan polisi di terima/dibuat sudah harus di tunjuk penyidik/penyidik pembantu yang menangani perkara ini
6. Saat itu pendik/penyidik pembantu menyusun rencana penyidikan sesuai klasifikasi kasus dan mengisi blanko kontrol perkara untuk di laporkan/ di ketahui oleh kanit
7. Penyidik/penyidik pembantusegera melengkapi administrasi penyidikan dan segera membuat dan mengirimkan SPDP ke kejaksaan
8. Pada saat penyidik/penyidik pembantu mulai melakukan pemanggilan baik kepada saksi atau tersangka, penerbit segera menerbitkan SP2HP kepada pelapor
9. Apabila dalam pemeriksaan dan perkembangan penyidikan terdapat kendala/hambatan sebagai contoh saksiatau tersangka yang di panggil tidak datang atau kendala/hambatan lain, segera penyidik/penyidik pembantu menerbitkan SP2HP sebagai pemberitahuan kepada pelapor
10. Pada saat berkas perkara di kembalikan oleh jaksa dengan petunjuk (p-19), penyidik pembantu menerbitkan SP2HP kepada pelapor
11. Setelah berkas perkara di lengkapi sesuai petunjuk P-19 dan di kirm kembali ke kejaksaan. Penyidik/penyidik pembantu menerbitkan SP2HP
12. Pada saat jaksa menemukan berkas perkara sudah lengkap (P-21), penyidik/penyidik pembantu menerbitkan SP2HP
13. Pada saat penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke kejaksaan (Tahap II) penyidik/penyidik pembantu menerbitkan SP2HP

14. Sesuai dengan klarifikasi kasus, tiap perwir unit, kepala unit sesuai tingkat kesatuan (struktur jabatan), WAJIB melakukan pengecekan setiap penanganan perkara disatuannya, sesuai dengan tahapan dan target waktu
15. Pada saat menentukan unsur pasal, setiap melakukan tindakan upaya paksa, WAJIB dilakukan gelar perkara
16. Setiap kanit, sesuai tingkat kesatuan (struktur jabatan) WAJIB nmenegur dan memberikan sanksi apabila penyidikan lambat (tidak sesuai target akibat kelalaian penyidik/penyidik pembantu

Di dalam undang-undang terdapat Jika masyarakat melanggar perda maka satpol PP yang akan bertindak dikarenakan satpol PP berada di Kecamatan. Dan jika memuat mengenai tindak pidana maka polisi yang akan bertindak.

Walaupun permasalahan hanya berada di perda maka harus tetap di dampingi dan berkoordinasi dengan kepolisian, karena perda itu terdapat pada kepolisian dan juga pada satpol PP. Sebagaimana tugas dari kepolisian itu adalah melindungi dan mengamankan perda. Dan setiap tugas negara itu harus di lindungi oleh kepolisian.

Seperti dalam kasus bolos sekolah, bermain di warnet pada jam sekolah, minum komik dan torpedo, merokok di jam sekolah dan ngelem. Berkoordinasi dengan kepolisian, karena nantik terdapat juga isu kriminal yang tidak ada perdanya maka akan menjadi ranahnya kepolisian, jika ada berkaitan dengan perda maka larinya pada bagian kasi trantib. Jadi tetap berkoordinasi dan tergantung pada kasus.

Untuk menyatukan kedua pihak tersebut perlu adanya koordinasi, apa giat yang akan di lakukan nantinya di perlukan kematangan dalam pelaksanaan tugas

di lapangan. Dan itu akan bekerja sesuai dengan tupoksi atau SOP yang di miliki dari kedua belah pihak.

Adapun bentuk koordinasi yang dilakukan camat yaitu dengan cara di undang untuk di adakan rapat upika tentang pembagian kewenangan sesuai dengan amanat perda dan peraturan. Boleh pihak kepolisian yang mengundang atau pihak kecamatan. Mana yang lebih dominan dalam sebuah kasus.

Koordinasi itu bisa di lakukan secara lisan dan tulisan. Koordinasi secara lisan itu menggunakan via telvon atau ketemu, dan koordinasi secara tulisan melalui via surat dari kepolisian pemberitahuan untuk giat bentuk patroli gabungan dalam hal kenakalan remaja.

Di dalam masalah kenakalan remaja ini belum terdapat regulasi khusus yang berbentuk komplit melainkan hanya sebatas himbauan. Adapun dasar membuat suatu himbaun berdasarkan tugas dan fungsi ketentraman dan ketertiban umum itu adalah informasi dari masyarakat. Yang di lakukan dengan cara melaporkan ke RT, lalu RT menindak lanjuti ke kelurahan dan kelurahan tindak lanjuti ke camat lalu laporan tersebut di sikapi oleh pihak camat. Setelah terbentuknya suatu kesimpulan maka berdasarkan laporan yang telah di sampaikan maka di buat suatu himbauan dengan mengundang kepolisian dan tokoh masyarakat.

Efektifnya suatu pengkoordinasian sangat terkait dengan sistem informasi dan komunikasi yang berlaku dalam organisasi. Dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan Kecamatan Tualang, maka komunikasi sangat di perlukan sebagai arahan dalam pembagian tugas kerja.

Tanpa adanya komunikasi yang baik maka pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian ini tidak akan berjalan dengan baik, tidak memiliki arahan, dan tidak tercapainya tujuan.

Di Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk sangat padat terutama di kota-kota besar. Dengan jumlah penduduk yang sangat padat tersebut, membuat Indonesia banyak mengalami masalah sosial. Menurut Soerjono Soekanto masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Salah satu bentuk masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah mengenai kenakalan remaja.

Kenakalan remaja adalah suatu bentuk aktivitas, kegiatan ataupun perbuatan yang melanggar norma, ketentuan, dan peraturan hukum. Para remaja ini melakukan tindakan tersebut karena didorong oleh berbagai faktor, dan ditambah adanya kesempatan. Perbuatan mereka disebut dengan tindakan patologis karena mereka melanggar norma hukum, dan berbuat di luar batas yang dapat merugikan keluarga, lingkungan tempat tinggal dan orang lain.

Tidak semua kenakalan remaja itu dilakukan secara individual. Tindakan ini juga sangat sering dilakukan secara berkelompok. Ada beberapa kenakalan remaja yang berakibat fatal sehingga mendapatkan sanksi hukum yaitu banyaknya remaja yang menggunakan narkoba yang didorong oleh rasa ingin tahu yang besar, ngelem, pencurian, balapan liar hingga tawuran.

Kepolisian negara republik indonesia atau POLRI dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Maka itulah tugas dari kepolisian karena setiap tugas negara di lindungi undang-undang.

Tualang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Kecamatan Tualang di huni oleh masyarakat yang heterogen, terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasanya masing-masing yang kegiatannya sehari-hari ada yang bertani, berdagang, karyawan swasta, dan juga pegawai pemerintah. Kecamatan Tualang merupakan salah satu kecamatan yang memiliki masalah sosial yang sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Salah satu masalah sosial yang perlu di perhatikan adalah masalah kenakalan remaja. Kasus ini sangat memprihatinkan karena jumlah penduduk yang paling besar di Kabupaten Siak ini adalah di Kecamatan Tualang.

Masalah kenakalan remaja yang banyak terjadi di Kecamatan Tualang ini adalah banyak di temui remaja yang bolos di warnet pada jam sekolah. Masalah ini koordinasi dengan korwil dan turun langsung dengan kapolsek. Tugas sebagai kasi trantib berkoordinasi dengan korwil menangkap dan di bawa ke camat setelah itu di serahkan ke korwil lalu korwil berkoordinasi dengan sekolah-sekolah.

Tindakan yang dilakukan dari kenakalan remaja itu yaitu dengan cara di razia, di amankan, di binaan sampai kepada bapak camat, kapolsek, korwil, setelah itu di data berapa anak yang terjaring lalu di buat berita acara serah terima bahwa pemerintah Kecamatan Tualang menyerahkan anak dan diberikan datanya. Setelah selesai korwil memanggil kepala sekolah dan wali kelas beserta orang tua untuk mengambil anaknya.

Pihak kecamatan dan polsek melakukan pembinaan remaja itu dengan langsung turun kesekolah untuk melakukan sosialisasi dan juga menyampaikan anak di bawah umur 17 tahun tidak di bolehkan mengendarai motor karena tidak memiliki SIM , itu semua mempunyai mou dalam kesepakatan kecamatan di wakili oleh kasi trantib, polsek oleh kanitlantas, korwil oleh dinas pendidikan menyatakan dan di rapatkan bahwa anak di bawah umur tidak di perbolehkan membawa sepeda motor dan bermain di warnet dan berkeluyuran pada saat jam sekolah.

Kenakalan remaja selain bolos ke warnet pada jam sekolah yaitu terdapat juga anak suka menghisap lem , mengkonsumsi komik serta torpedo, dan juga merokok dalam sekolah yang dapat melanggar norma perilaku. Kenakalan tersebut tetap berkoordinasi dengan kepolisian karena berdasarkan tupoksi masing-masing ketika ada kesamaan maka persoalan itu di tangani bersama. Jika terjadinya kenakalan maka pihak camat dan kepolisian ini berkoordinasi.

Yang sangat berpengaruh dari kenakalan remaja ini adalah dari didikan orang tua sendiri, ekonomi, dan pergaulan. Pergaulan yang salah dan kurangnya

kontrol dari orang tua dan di tambah merebaknya penggunaan ponsel, warnet, dan sepeda motor menyebabkan remaja dengan mudah mengakses informasi yang salah dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang seperti kenakalan remaja yang lainnya yaitu adanya remaja yang ngelem, berkeliaran di warnet pada jam sekolah, tawuran antar sekolah serta mengkonsumsi komik dan torpedo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Glori di Polsek Tualang penyebab dari kenakalan remaja itu sendiri adalah sumber daya manusia itu sendiri yaitu kurangnya minat belajar yang ada di diri sehingga memungkinkan untuk melakukan perbuatan yang negatif, dan di pengaruhi oleh faktor ekonomi.

Sebagaimana tugas camat yang sudah di cantumkan pada Peraturan Bupati Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi camat pasal 5 ayat 1. Di Kecamatan Tualang masih banyak terdapat masalah ketentraman dan ketertiban umum terutama mengenai kenakalan remaja seperti bolos sekolah, ke warnet di jam sekolah, ngelem, hingga ada yang mengkonsumsi komik dan torpedo.

Remaja sebagai generasi penerus bangsa harus selalu mendapat perhatian khusus, tanpa kendali orang tua, masyarakat, dan pemerintah, remaja akan mudah terjerumus pada pergaulan yang salah, yang akhirnya berdampak pada kenakalan remaja. Harus adanya upaya membuat langkah kongkrit guna mengeliminir kenakalan generasi penerus bangsa di kota industri ini. Selain itu pemerintah dan instansi terkait harus proaktif mengajak semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam mengatasi kenakalan remaja yang sudah mengkhawatirkan.

penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tualang ini adalah karena kecamatan Tualang memiliki penduduk terpadat di Kabupaten Siak dan masih

banyak permasalahan tentang kenakalan remaja yang sangat memprihatinkan. Dimana masih banyaknya remaja dan anak-anak yang melakukan penyelewengan atau penyimpangan seperti bolos sekolah, ngelem, bermain di warnet pada jam sekolah, tawuran, hingga mengkonsumsi komik dan torpedo.

Adapun fenomena yang di temukan adalah :

1. Masih banyaknya di temui kasus kenakalan remaja yang ada di Kecamatan Tualang seperti bolos di jam sekolah, merokok di jam sekolah , bermain di warnet pada jam sekolah , tawuran hingga masih di temui juga anak-anak remaja yang menghisap lem, serta meminum campuran komik dan torpedo.
2. Lambatnya penanganan pihak kecamatan dengan kepolisian dalam menangani kasus kenakalan remaja di Kecamatan Tualang
3. Kurangnya pengawasan, bimbingan dan perhatian orang tua sehingga anak mudah berpengaruh lingkungan yang buruk.
4. Tingkat pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengatasi kenakalan remaja yang masih belum maksimal

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimanakah Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?”

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

2. Kegunaan Penelitian

- a. Guna Teoritis, bahwa dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi publik minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian.
- b. Guna Akademis, hasil penelitian ini di harapkan juga dapat sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya
- c. Guna Praktis, dari hasil penelitian ini di harapkan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi camat dalam pelaksanaan koordinasi dalam mengamankan kenakalan remaja di kecamatan tualang kabupaten siak.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Teori Administrasi

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin *danministrare* yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi,” serta *administratio* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, dan pemerintahan, pengelolaan”.

Di indonesia mengenal dan memahami “administrasi” dari dua bahasa yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. *Pertama*, *administratie* dari bahasa Belanda yang mencakup pengertian *stelselmatige verkrijging, en verking van gegevens* (dalam bahasa indonesia disebut “tata usaha” “administrasi dalam arti sempit”).

Administrasi sebagai ketatausahaan yang dalam bahasa inggris di gunakan istilah *clerical work, paper work, office work*. Atau administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penyimpanan, penggandaan, pengiriman berbagai informasi yang di terima atau di keluarkan oleh suatu organisasi.

Kedua, administrasi yang berasal dari bahasa inggris sering di sebut sebagai administrasi dalam arti luas, yakni proses (rangkaiian) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara

efisien. Dengan demikian, dalam pengertian administrasi terkandung hal-hal berikut : kelompok orang manusia, kegiatan, kerja sama, tujuan, efisiensi.

Sebagai “proses”, administrasi menggambarkan berjalannya suatu kegiatan kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dalam sebuah proses, terdapat rencana-rencana, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, dan juga kebijakan strategi, serta upaya untuk mencapai tujuan yang ingin di capai. Dengan kata lain, administrasi sebagai proses merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan mengarah pada pencapaian tujuan yang ingin di capai.

Manurut The Liang Gie (dalam Hamalli, 2018;3), administrasi adalah rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang di lakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya menurut Sondang P.Siagian (dalam Syafri, 2012;9) administrasi di definisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang di dasarkan atas rasionalitas untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

Sedangkan Robbins (2018;3) mengatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses dari aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dengan melalui orang lain.

Ordway Tead (2018;4), administrasi adalah kegiatan-kegiatan individu dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan, dan menyediakan

fasilitas usaha kerja sama sekelompok individu untuk merealisasikan tujuan yang di tentukan.

Menurut John A. Vieg (dalam Syafri, 2012;8) dalam arti yang sederhana, administrasi ialah tindakan yang di tetapkan untuk mengejar maksud yang di sadari. Batasan tersebut mengindikasi dua hal, yaitu :

1. Kegiatan yang telah di tetapkan atau direncanakan, atau
2. Kegiatan itu di lakukan untuk mencapai maksud yang di kehendaki

Sedangkan menurut Dwight Waldo (dalam Syafri, 2012;10) menyebut administrasi sebagai “*cooperative rational action*” yaitu adalah tindaan yang di perhitungkan dengan cermat untuk merealisasi tujuan tertentu yang di kehendaki dengan kerugian/pengorbanan yang minimal untuk mewujudkan tujuan lain yang di kehendaki.

Ide pokok pendapat waldo di atas adalah :

1. Administrasi adalah kegiatan
2. Kegiatan itu di lakukan dalam rangka kerja sama sekelompok orang
3. Rangkaian kegiatan kerjasama yang efisien itu di lakukan untuk mencapai tujuan yang di kehendaki

Selanjutnya menurut Luther Gulick (dalam Syafiie, 2003;4) Administrasi adalah suatu sistem pengetahuan di mana olehnya manusia dapat mengerti hubungan-hubungan meramalkan akibat-akibat dan mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan di mana orang-orang secara teratur bekerja sama untuk tujuan bersama.

Maka dapat di simpulkan bahwa administrasi itu adalah suatu kegiatan yang di lakukan oleh sekelompok orang yang ada di dalam suatu organisasi yang memiliki tujuan yang dilakukan secara efisien.

2. Konsep Teori Organisasi

Telah banyak definisi tentang organisasi yang di kemukakan para ahli. Di antaranya adalah Robbins, S.P (dalam Sopiah, 2008;2), yang menyatakan bahwa, organisasi adalah satuan sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi atas dasar yang relatif kontinu untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan bersama.

Organisasi juga didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerja sama yang di lakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

Louis Allen menjelaskan Organisasi adalah proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan di lakukan, menetapkan dan melimpahkan tanggung jawab dan wewenang, serta mewujudkan hubungan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan (dalam Sukarna, 2011;38);

Menurut Gitosudarmo (dalam Sopiah,2008;2) Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerja sama yang di lakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa sekumpulan orang dapat di katakan sebagai organisasi jika memenuhi 4 unsur pokok, yaitu :

1. Organisasi itu merupakan suatu sistem
2. Adanya suatu pola aktivitas

3. Adanya tujuan yang telah di tetapkan

Dari pendapat-pendapat yang telah di kemukan tersebut, maka kesimpulannya organisasi itu adalah sekelompok orang yang melakukan aktivitas kerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

3. Konsep Teori Manajemen

Sebagai ilmu pengetahuan, manajemen dapat di terapkan dalam semua organisasi manusia seperti perusahaan, pemerintahan, pendidikan, sosial,keagamaan, dan sebagainya.

Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin di perlukan, atau berarti tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri (Herlambang, 2013;3).

Manajemen menurut Millet (2018;34) adalah sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk pencapaian tujuan.

Sedangkan manajemen menurut Ordway Tead (2013;4), adalah sebagai sebuah proses dan perangkat yang mengarahkan dan membimbing kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam definisi ini menitikberatkan pada proses dan perangkat yang di pergunakan dalam mencapai tujuan organisasi.

Koontz dan O'Donnel (dalam Hasibuan, 2001;3) manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain .dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.

Selanjutnya menurut Stoner (dalam Herlambang, 2013;4), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Stoner menggunakan kata proses bukan seni, mengartikan bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan pribadi. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Perencanaan berarti bahwa para manajer memikirkan kegiatan-kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. Berbagai kegiatan ini biasanya didasarkan pada berbagai metoda, rencana atau logika, bukan hanya atas dasar dugaan atau firasat.

Sedangkan pengarahan yaitu para manajer mengarahkan, memimpin, dan mempengaruhi para bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi menyelesaikan tugas-tugas melalui orang lain.

Selanjutnya pengawasan berarti para manajer berupaya untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuan-tujuannya, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan jalur yang benar maka para manajer harus membetulkannya.

Menurut George R. Terry (dalam Herlambang, 2013;5) mendefinisikan manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* yang penggunaannya secara ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen menurut Pfiffner (2011;2), mengatakan manajemen bertalian dengan membimbing orang-orang dan fungsi-fungsi untuk menetapkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Hasibuan (2001;2) Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. (Hasibuan,2001;2)

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen itu adalah suatu seni untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dan diberikan pengarahan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

4. Konsep Teori MSDM

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bidang strategis dari organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus dipandang sebagai perluasan dari pandangan tradisional untuk mengelola orang secara efektif dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan mengelolanya

Menurut Simamora (dalam Sutrisno,2009;5) manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja.

Sedangkan Dessler menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia dapat di definisikan sebagai suatu kebijakan dan praktek yang di butuhkan seseorang yang menjalankan aspek “orang” atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian (Sutrisno,2009;5).

Selanjutnya menurut Schuler MSDM merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberikan kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat (Sutrisno, 2009;6).

Serta menurut Stoner (dalam Sutrisno,2009;6), MSDM meliputi penggunaan SDM secara produktif dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi dan pemuasan kebutuhan pekerja secara individual.

Menurut Wendell French, (dalam Fustino,2003;6), MSDM adalah penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi.

Moh. Agus Tulus mengatakan MSDM adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan organisasi, individu, dan masyarakat(dalam Fustino, 2003;6).

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa MSDM adalah suatu ilmu atau cara untuk mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki individu secara efisien dan efektif yang di gunakan semaksimal mungkin untuk mencapai suatu tujuan.

5. Konsep Teori Koordinasi

Manusia adalah makhluk sosial dan organisasional, ia tidak dapat hidup sendiri tanpa berkoordinasi. Koordinasi selalu di perlukan dalam setiap organisasi,

baik dalam organisasi yang sederhana maupun yang besar. Dalam mencapai tujuan organisasi selalu ada saja hal-hal yang saling berkaitan dan perlu di koordinasikan. Koordinasi perlu di laksanakan mulai dari proses perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan dan pengendaliannya

Koordinasi di dalam objek organisasi dapat di katakan sebagai sebuah proses saling mengerti antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal. Proses yang harus di jalani agar suatu kegiatan dapat di laksanakan dengan lancar ataupun jika ada masalah tidak akan terlalu banyak kesulitan untuk mengatasinya.

Coordinating atau mengoodinasi merupakan salah satu fungsi manajmen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percecokan, perselisihan dengan jalan menghubungkan-hubungkan, menyatupadukan dan menyelarsakan pekerjaan-pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi (dalam Supomo, 2018;29)

Menurut Hardidiningrat (2000;88) koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar kegiatan dari bagian-bagian itu selesai waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan.

Sedangkan G.R. Terry (dalam Hasibuan, 2001;85) berpendapat bahwa koordinasi merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah di tentukan. Defenisi G.R. Terry ini berarti bahwa koordinasi adalah pernyataan usaha dan meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

1. jumlah usaha, baik kuantitatif maupun secara kualitatif
2. waktu yang tepat dari usaha-usaha ini
3. pengarahannya usaha-usaha ini

E.F.L. Brech (dalam Hasibuan, 2001;85) koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu di laksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Selanjutnya menurut Usman (2013;488), koordinasi ialah proses mengintegrasikan (memadukan), menyinkronisasikan dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Mc. Farland (dalam Handayaniningrat, 1985;89) menjelaskan bahwa koordinasi adalah suatu proses di mana pemimpin mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Mc. Farland (dalam Handayaniningrat, 1985;89), koordinasi dapat di ukur melalui indikator berikut ini:

1. Komunikasi
 - a. Memberi informasi
 - b. Ada tidaknya alur informasi
 - c. Ada tidaknya teknologi informasi
2. Kesadaran pentingnya koordinasi
 - a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi

- b. Keselarasan aktivitas
3. Kompetensi SDM yang terlibat koordinasi
 - a. Kualitas SDM terhadap koordinasi
 - b. Kuantitas SDM terhadap koordinasi
4. Kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi
 - a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
 - b. Ada tidaknya pelaksana kegiatan
 - c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan
 - d. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana kesepakatan
5. Kontinuitas perencanaan
 - a. Ada tidaknya umpan balik
 - b. Pengembangan perencanaan

Menurut Hasibuan (2006:88) bahwa cara-cara mengadakan koordinasi sebagai berikut :

1. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat, keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup karena tindakan-tindakan yang tepat harus di ambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik.
2. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan di capai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuan sendiri-sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama
3. Mendorong para anggota agar bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran dan lainnya,
4. Mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan
5. Menejer human relations yang baik antara sesama karyawan
6. Menejer sering melakukan komunikasi informasi dengan bawahan

Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara di sisi lainnya pada sisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain.

Secara normatif, koordinasi bisa diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyelaraskan, menyetarakan, dan mengimbangkan kegiatan-kegiatan spesifik atau berbeda, agar nantinya semua terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsionalnya, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Maka koordinasi itu adalah proses penyepakatan bersama yang mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa, sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur tersebut terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain.

Koordinasi memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :

- 1) Tujuan koordinasi untuk menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penerasian, kebersamaan dan keseimbangan antara berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.
- 2) Tujuan koordinasi untuk mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya di setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan

- 3) Tujuan koordinasi untuk menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak di rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lainnya, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Maka dapat di simpulkan bahwa koordinasi itu merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan yang di lakukan dua orang atau lebih yang bekerja sama secara terarah agar kegiatan tersebut dapat di laksanakan dengan lancar dan tepat pada waktunya

6. Konsep Teori Komunikasi

Manusia adalah makhluk yang pandai berbicara, menulis, dan menggunakan bahasa tubuh. Manusia menyampaikan pendapat, perasaan, dan tindakannya melalui ucapan, tulisan dan tindakan. Untuk menyampaikan dan menerima pendapat, perasaan dan tindakan memerlukan komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan yang saling penting dalam berorganisasi.

Menurut Ross (2012;42), komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa, sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon dari pikirannya yang serupa dengan yang di maksudkan oleh komunikator.

Menurut Webster (2007;170) istilah komunikasi berasal dari istilah latin *Communicare*, bentuk *past pasrtisiple* dari *communicatio* dan *communicatus* yang artinya suatu alat untuk berkomunikasi terutama suatu sistem penyampaian dan penerimaan berita.

Sedangkan menurut Ruslan (2012;92), komunikasi adalah pertukaran informasi dan penyampaian makna yang merupakan hal utama dari suatu sistem

sosial atau organisasi. Jadi komunikasi sebagai suatu proses penyampaian informasi.

Dari pendapat para ahli di atas maka dalam berkomunikasi di perlukan kesamaan makna terhadap maksud yang hendak di sampaikan. Komunikasi sangat di butuhkan dalam suatu hubungan atau pekerjaan agar pekerja lain mengerti arah yang hendak di capai.

Selanjutnya menurut Thoha (2007;167) komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain. Untuk mengetahui apakah umpan balik dalam berkomunikasi antara pejabat-pejabat atau pegawai-pegawai dalam suatu organisasi tertentu, efektif atau tidak efektif.

Adapun umpan balik yang efektif antara lain :

1. Intensif
2. Kekhususan
3. Deskriptif
4. Kemanfaatan
5. Tepat waktu
6. kesiapan
7. Kejelasan
8. Validasi

Menurut Usman (2013;470) komunikasi adalah proses penyampaian atau penerimaan pesan dari satu orang ke orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, secara tertulis, lisan maupun nonverbal.

Prinsip komunikasi menurut Usman (2013;477) prinsip-prinsip komunikasi yang harus di lakukan komunikator adalah sebagai berikut :

1. Penuh minat terhadap materi pesan,
2. Menarik perhatian bagi komunikan

3. Di lengkapi alat peraga
4. Menguasai materi pesan
5. Mengulang bagian yang penting
6. Memiliki kegunaan
7. Jangan menganggap bahwa setiap orang sudah mengerti pesan yang kita berikan.

Dari pendapat di atas jelaslah bahwa komunikasi sangat berperan di dalam suatu organisasi. Adapun organisasi itu sendiri merupakan kumpulan orang-orang yang membutuhkan berkomunikasi dengan sesama anggota dan pimpinan.

Dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, komunikasi sangatlah berperan dan di perlukan sebagai arahan dan penentuan pembagian tugas kerja dalam melaksanakan penertiban dari kenakalan remaja.

Tanpa adanya komunikasi yang baik maka koordinasi camat dengan kepolisian ini dalam mengamankan kecamatan tualang dari kenakalan remaja tidak akan bisa berjalan dengan baik, karena tidak adanya arahan, penyelarasan dan pengintegrasian tujuan kerja. Maka agar efektif dalam koordinasi maka peran komunikasi sangat di butuhkan dalam pelaksanaannya.

7. Konsep Teori Pelaksanaan

Jika di kaitan dengan penjelasan administrasi dan manajemen, berarti bahwa, sumber daya manusia berperan penting dalam proses administrasi dan manajemen. Karena administrasi merupakan segenap aktivitas kerja pegawai yang bersangkutan dengan penggunaan tenaga kerja secara bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan manajemen memiliki hubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian maka

dapat di artikan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi merupakan implementasi dari proses penerapan proses administrasi manajemen.

Menurut Terry (1986) pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut, oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Seperti yang di kemukakan Siagian (2006;126) pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang di arahkan pada keberhasilan tugas tang tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada jadi, untuk melaksanakan tugas tersebut perlu adanya pembinaan dari atasan kepada bawahan.

Selanjutnya George R. Terry (dalam Syafiie, 2006;81) pelaksanaan kerja adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenaan berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat pula di katakan bahwa yang di lakukan atau yang di kerjakan oleh pegawai harus mempunyai ukuran pelaksanaan tugas yang jelas sehingga pekerjaan yang di lakukan selalu sesuai dengan penyelesaian yang di tetapkan. Pelaksanaan tugas mempunyai hubungan yang erat dengan masalah produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suau organisasi

Satandar pelaksanaan tugas perlu di rumuskan guna di jadikan sebagai tolak ukur di dalam menjadikan perbandingan antara apa yang telah di lakukan dengan apa yang telah di percayakan kepada seseorang. standar bermaksud dapat pula di

jadikansebagai ukuran dalam mengadakan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah di lakukan.

Dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan ini merupakan fungsi manajemen yang sangat mendasar setelah adanya manusia dan organisasi, karena jika manusia yang ada di dalam organisasi tidak mampu menjalankan roda dalam sebuah organisasi maka organisasi tersebut tidak akan bisa berjalan.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan variabel penelitian “koordinasi”, selanjutnya di ukur dengan beberapa teori yang kemudian peneliti jadikan sebagai kerangka pikir, dan peneliti menggunakan teori dari Handayaniningrat. Dari poin-poin koordinasi dari teori Handayaniningrat, penulis jadikan sebagai indikator.

Adapun indikator yang di gunakan adalah mengadakan komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi SDM yang terlibat, kesepakatan komitmen dan insentif koordinasi, serta kontinuitas perencanaan. Selanjutnya di gambarkan sebagai berikut :

Gambar II.1 : Kerangka pikir penelitian tentang Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.



Sumber : Modifikasi Penulis 2019

C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang telah di kemukan peneliti di atas maka dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut: “ Diduga Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Belum Terlaksana Dengan Baik “Untuk membuktikannya maka di dalam penelitian ini penulis menggunakan teori menurut Handayani (1989;80) menjelaskan bahwa koordinasi adalah suatu proses dimana pemimpin mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Handayani (1989:80), koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator berikut ini:

- 1 Komunikasi
 - a. Memberikan informasi
 - b. Ada tidaknya alur informasi
 - c. Ada tidaknya teknologi informasi
- 2 Kesadaran pentingnya koordinasi
 - a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi
 - b. Keselarasan aktivitas
- 3 Kompetensi SDM yang terlibat koordinasi
 - a. Kualitas SDM terhadap koordinasi
 - b. Kuantitas SDM terhadap koordinasi
- 4 Kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi
 - a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
 - b. Ada tidaknya pelaksana kegiatan
 - c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan
 - d. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana kesepakatan
- 5 Kontinuitas perencanaan
 - a. Ada tidaknya umpan balik
 - b. Pengembangan perencanaan

D. Konsep Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas serta menghindari kesalahpahaman, penulis memberikan definisi konsep dalam penelitian ini. Maka perlu diketahui dan dijelaskan beberapa konsep operasional sebagai berikut.

1. Administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
2. Organisasi adalah wadah untuk melakukan kegiatan administrasi yang terdiri dari kumpulan yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
3. manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya
4. MSDM merupakan suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat secara maksimal.
5. koordinasi merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.
6. Komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, sekelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan

menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.

7. Pelaksanaan merupakan suatu usaha untuk menggerakkan dan mengarahkan sekelompok orang hingga berkeinginan untuk berusaha dan bertanggung jawab untuk mencapai suatu keberhasilan
8. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota.
9. Kompetensi partisipan adalah adanya pihak-pihak yang berwenang yang terlibat dan mengawasi jalannya koordinasi.
10. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.
11. Komitmen adalah suatu sikap setia dan tanggung jawab seseorang terhadap sesuatu, baik itu diri sendiri, orang lain, organisasi, maupun hal tertentu.
12. Kontinuitas perencanaan yaitu apabila koordinasi sudah berjalan maka perlu di lihat ada atau tidaknya feedback umpan balik dari obyek maupun subyek koordinasi tersebut.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1 :Operasional Variabel Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
<p>menjelaskan bahwa koordinasi adalah suatu proses di mana pemimpin mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Mc. Farland (handayaniningrat , 1985;89)</p>	<p>Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamanan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak</p>	1. komunikasi	<p>Memberikan informasi</p> <p>Adatidaknya alur informasi</p> <p>Ada tidaknya teknologi informasi</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana</p> <p>Kurang Terlaksana</p>
		2. kesadaran pentingnya koordinasi	<p>Tingkat pengetahuan pelaksanaan terhadap koordinasi</p> <p>Keselarasn aktivitas</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana</p> <p>Kurang Terlaksana</p>
		3. kompetensi SDM yang terlibat koordinasi	<p>Kualitas SDM yang terlibat koordinasi</p> <p>Kuantitas SDM yang terlibat koordinasi</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana</p> <p>Kurang Terlaksana</p>

1	2	3	4	5
		4. kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi	<p>Ada tidaknya bentuk kesepakatan</p> <p>Ada tidaknya pelaksanaan kegiatan</p> <p>Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan</p> <p>Ada tidaknya insentif bagi pelaksanaan kesepakatan</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana</p> <p>Kurang Terlaksana</p>
		5. kontinuitas perencanaan	<p>Ada tidaknya umpan balik</p> <p>Pengembangan perencanaan</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana</p> <p>Kurang Terlaksana</p>

Sumber Data Olahan Penulis 2019

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator.

Untuk menentukan pengukuran masing-masing indikator dari variabel penelitian mengenai Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam

Mengamankan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, teknik pengukuran yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

Terlaksana : jika rata-rata penelitian responden terhadap indikator penelitian yang berjudul Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berada di antara persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana : jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penilaian yang Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, berada di antara persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana : penelitian yang berjudul Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, berada di antara 1%-33%

Adapun indikator yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Komunikasi

Terlaksana : apabila hasil penelitian terhadap indikator komunikasi telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang

berada pada rata persentase di angka 67-100%

Cukup Terlaksana : apabila hasil penelitian terhadap indikator komunikasi telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata persentase di angka34-66%

Kurang Terlaksana : apabila hasil penelitian terhadap indikator komunikasi telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata persentase di angka0-33%

2. Kesadaran pentingnya koordinasi

Terlaksana : apabila hasil penelitian terhadap indikator kesadaran pentingnya koordinasi telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 67-100%

Cukup Terlaksana : apabila hasil penelitian terhadap indikator kesadaran pentingnya koordinasi telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 34-66%

Kurang Terlaksana : apabila hasil penelitian terhadap indikator kesadaran pentingnya koordinasi telah di

laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 0-33%

3. Kompetensi partisipan

Terlaksana : apabila hasil penelitian terhadap indikator kompetensi partisipan telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 67-100%

Cukup Terlaksana : apabila hasil penelitian terhadap indikator kompetensi partisipan telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 34-66%

Kurang Terlaksana : apabila hasil penelitian terhadap indikator kompetensi partisipan telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 0-33%

4. Kesempatan, komitmen, dan insentif koordinasi

Terlaksana : apabila hasil penelitian terhadap indikator Kesempatan, komitmen, dan insentif koordinasi telah di laksanakan sesuai

ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 67-100%

Cukup Terlaksana : apabila hasil penelitian terhadap indikator Kesempatan, komitmen, dan insentif koordinasi telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 34-66%

Kurang Terlaksana : apabila hasil penelitian terhadap indikator Kesempatan, komitmen, dan insentif koordinasi telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 0-33%

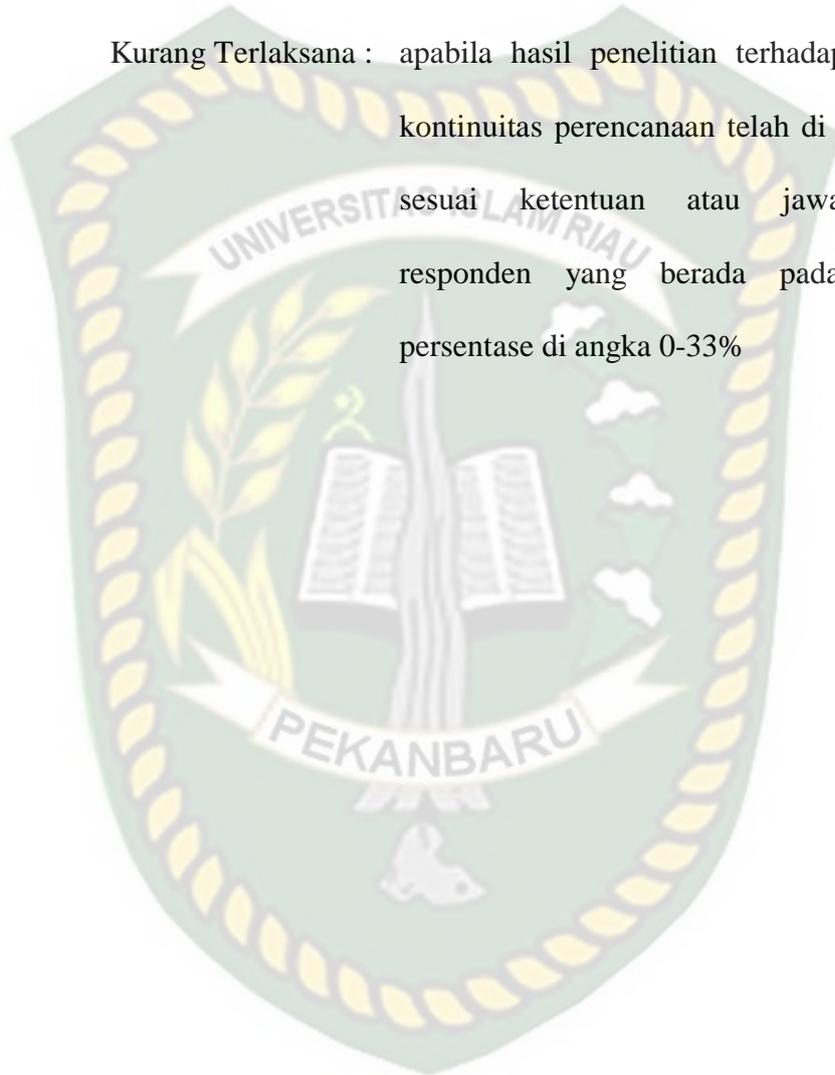
5. Kontinuitas perencanaan

Terlaksana : apabila hasil penelitian terhadap indikator kontinuitas perencanaan telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 67-100%

Cukup Terlaksana : apabila hasil penelitian terhadap indikator kontinuitas perencanaan telah di laksanakan

sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 34-66%

Kurang Terlaksana : apabila hasil penelitian terhadap indikator kontinuitas perencanaan telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 0-33%



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam pengumpulan data yang di butuhkan dalam penelitian, maka tipe penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variabel yang di teliti dalam penelitian ini. Kemudian pendekatan kuantitatif yaitu menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman serta menyeluruh dan utuh dari objek yang di teliti agar di peroleh gambaran yang jelas. (Sugiono, 2008:56).

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada di latar belakang masalah yang di paparkan penulis, maka jelas penelitian ini di lakukan dengan mengambil dan memperoleh data di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Adapun pertimbangan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tualang ini adalah karena Kecamatan Tualang memiliki penduduk terpadat di kabupaten siak dan masih banyak permasalahan tentang kenakalan remaja seperti bermain di warnet di jam sekolah, merokok di jam sekolah, ngelem, mekonsumsi komik dan torpedo, serta tawuran antar sekolah.

C. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri atas manusia, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, hewan dan gejala-gejala, nilai test atau

peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian, Nawawi (dalam Pasalong 2013;99).

Jadi, populasi adalah kumpulan kasus atau wilayah generalisasi yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan demikian populasi dimaksudkan agar suatu penelitian dapat mengukur sesuatu sesuai dengan kasusnya.

Sampel adalah sebagian bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian, Nawawi (dalam Pasalong 2013;100). Dengan kata lain sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi.

Yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah kasi trantib, pegawai seksi trantib, kepala unit reskrim, anggota reskrim masyarakat.

Dimana dalam penelitian ini memilih kasi trantib di karenakan karena mereka bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan serta berkoordinasi dengan kepolisian guna mengamankan kenakalan remaja yang ada di kecamatan Tualang.

Masyarakat yang di maksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada pada kawasan kenakalan remaja yaitu berada di desa Tualang. Yang mana di desa Tualang itu masih di temuinya kenakalan remaja seperti bolos sekolah, bermain di warnet pada jam sekolah, hingga ngelem.

Tabel III.1 : Tabel populasi dan sampel penelitian tentang Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam mengamankan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Informan Penelitian	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kasi Trantib	1 orang	1 orang	100%
3	Anggota Seksi Trantib	13 orang	13 orang	100%
4	Ka Unit Reskrim	1orang	1 orang	100%
5	Anggota Reskrim	10 orang	10 orang	100%
6	Masyarakat	∞	35 orang	100%
	Jumlah		60 orang	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi. Mengingat anggota populasi yang ada di kantor camat dan kepolisian hanya di ambil sebagian yaitu hanya pegawai seksi trantib dan anggota reskrim maka teknik penarikan sampel yang di gunakan yaitu purposive sampling yaitu orang yang terlibat dalam penelitian ini.

Kemudian penarikan sampel untuk masyarakat juga menggunakan metode purposive sampling .purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini di gunakan apabila anggota sampel yang di pilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.

E. Jenis Dan Sumber Data

Adapun yang menjadi jenis sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer merupakan data utama yang di peroleh langsung dari responden melalui wawancara, angket, dan observasi.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan datadan informasi keterangan yang di peroleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini dapat berupa gambaran umum mengenai lokasi penelitian, struktur organisasi, arsip, literatur serta laporan tentang Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap yang di butuhkan dalam penelitian ini, maka di gunakan teknik pengumpulan data yang meliputi yang berkaitan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini, pengumpulan data di kumpulkan dengan cara sebagai berikut :

1. Kuisisioner

Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan tertulis pada responden untuk di jawabnya. Dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang di anggap tahu tentang objek penelitian peneliti.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini di lakukan agar informasi yang di dapat oleh peneliti lebih jelas dan akurat serta mendalam. Dan kemudian, teknik ini juga

sangat bermanfaat jika di terapkan pada informanyang di jadikan sampel dan banyak tahu tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti

3. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan tentang permasalahan yang ada dalam penelitian.

4. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan tentang permasalahan yang ada dalam penelitian dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen baik dalam bentuk foto, vidio, rekaman dan lainnya

G. Teknik Analisis Data

1. Menjabarkan kata Numerik dari satu variabel dengan sebaran (Distribusi) frekuensi dengan data tingkat ordinal
2. Sebaran data Numerik di analisis berdasarkan bobot dan jumlah responden
3. Tipe skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert di gunakan untuk mendapatkan persentase persepsi dari satu indikator
4. Ukuran persepsi di ambil dan di analisis berdasarkan rentang pengukuran yang di rumuskan
5. Hasil persepsi dari setiap indikator di rekapitulasi dan di tarik persentase untuk satu variabel
6. Hasil persepsi di simpulkan berdasarkan rentang penelitian yang telah di rumuskan

$$\text{Rumus Skala Likert} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$$

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat dalam tabel ini :

Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Tentang Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kecamatan Tualang Dari Kenakalan Remaja Di Kabupaten Siak

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke...																											
		Juni				Juli				Agus				Sep				Okt				Nov				Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																								
2	Seminar UP																												
3	Revisi UP					■	■	■	■																				
4	Revisi Kuisioner									■	■	■	■																
5	Rekomendasi Survey																												
6	Survey lapangan																												
7	Analisis Data																												
8	Penyusunan Laporan Hasil penelitian																												
9	Konsultasi skripsi																												
10	Ujian komprehensif																												
11	Revisi skripsi																												
12	Penggandaan skripsi																												

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Siak

Kabupaten Siak merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang – Undang No. 53 Tahun 1999, tanggal 4 Oktober 1999 dengan ibu kota adalah Siak Sri Indrapura. Wilayah Kabupaten Siak sebagai bagian dari Propinsi Riau secara geografis terletak pada daratan pulau Sumatera bagian timur dengan letak geografis berada pada $100^{\circ} 54,5^1 - 102^{\circ} 52^1$ bujur timur dan $2^{\circ}30^1 - 0^{\circ} 17^1$ lintang utara, dengan luas wilayah lebih kurang 8.556,09 Km². Batas – batas wilayah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Tebing Tinggi dan kecamatan Merbau, Kabupaten Bengkalis
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bunut dan Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar

Secara administrative berdasarkan data tahun 1999 di Kabupaten Siak terdapat 3 kecamatan yaitu kecamatan Siak, kecamatan Sungai Apit dan kecamatan Minas. Namun berdasarkan kerangka acuan, jumlah kecamatan tersebut telah bertambah menjadi 14 kecamatan.

Wilayah Kabupaten Siak dilihat dari keadaan topografinya termasuk ke dalam fisiografi dataran rendah, yaitu daerah dengan ketinggian antara 0 – 8 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng datar sampai dengan sangat datar/landai (0-2%). Kecamatan Minas merupakan kecamatan yang paling tinggi yang berada di wilayah bagian barat kabupaten Siak dengan ketinggian 8,4 meter di atas permukaan laut.

Kondisi tanah didominasi oleh jenis tanah organosol dan gleihumus dengan bahan induk pembentuk jenis tanah ini adalah alluvial yang dimanifestasikan dalam bentuk rawa-rawa, bergambut. Jenis tanah seperti ini mengandung asam dan miskin akan unsure hara namun baik untuk pertanian tanaman lahan basah dan lahan kering seperti untuk tanaman padi, kelapa, karet, kopi dan sawit.

Kondisi iklim wilayah kabupaten Siak pada umumnya memiliki iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh sifat-sifat iklim laut. Musim hujan berlangsung pada bulan September sampai dengan bulan Januari dimana matahari berada di belahan bumi bagian selatan dan angin bertiup dari arah barat daya dan barat laut. Musim kemarau berlangsung pada bulan Februari sampai dengan Agustus dimana matahari berada pada belahan bumi bagian utara dan angin bertiup dari arah timur laut dan tenggara. Curah hujan antara 900 mm sampai dengan 1.500 mm setiap tahunnya dengan jumlah hari hujan antara 40 sampai 110 hari. Suhu rata-rata terendah sebesar 26⁰ celcius dan tertinggi mencapai 32⁰ celcius dengan kelembaban udara rata-rata 85%.

Di wilayah Kabupaten Siak terdapat beberapa sungai dengan sungai terbesar adalah Sungai Siak yang melalui Kecamatan Siak yang mengalir dari barat ke timur yang membelah dua wilayah kabupaten Siak. Sungai- sungai lainnya yang ada di kabupaten Siak adalah Sungai Gasib melalui Kecamatan Siak, Sungai Apit, Sungai Rawa dan Sungai Buntan yang melalui kecamatan Minas. Keberadaan sungai –sungai yang ada di Kabupaten Siak sangat strategis terutama perannya yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana perhubungan dan aktifitas perekonomian maupun social. Di samping itu keberadaan sungai – sungai tersebut juga dimanfaatkan oleh sebagian besar penduduk untuk mandi dan mencuci.

Berdasarkan kondisi eksisting yang ada di Kabupaten Siak, bahwa pada saat ini sebagian penghasilan masyarakat didapat dari sektor perkebunan dan tanaman pangan yaitu komoditi padi, kelapa sawit, kelapa dan karet. Berdasarkan hasil analisis fisik kawasan ternyata lahan yang ada dan sesuai bagi perkembangan kegiatan tersebut di atas cukup besar maka perlu usaha yang lebih optimal untuk meningkatkan kegiatan disektor tanaman pangan yang optimal untuk meningkatkan kegiatan disektor tanaman pangan dan perkebunan tersebut, sehingga pendapatan masyarakat lebih meningkat lagi. Bila dilihat dari potensi pertambangan yang ada, di Kabupaten Siak mempunyai potensi tambang yang potensial bagi pemasukkan pendapatan daerah, yaitu dari pertambangan minyak bumi. Walaupun demikian sesuai fakta yang ada ternyata ada yang perlu diperhatikan yaitu model pengolahannya sehingga potensi tersebut dapat

menunjang perkembangan kabupaten Siak dan bermanfaat bagi penduduk terutama terhadap perkembangan fisik kawasan.

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan yang diharapkan sebagai motor penggerak pembangunan khususnya pembangunan ekonomi baik di pedesaan maupun diperkotaan. Sebagai penggerak ekonomi, penduduk tidak hanya dilihat dari kuantitasnya saja akan tetapi juga dari segi kualitasnya terutama penduduk pada usia produktif dimana penduduk usia produktif merupakan tenaga kerja potensial dari suatu daerah.

B. Gambaran umum Kecamatan Tualang

Terbentuknya Kecamatan Tualang sebagai institusi yang berperan menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah otonomi Kabupaten Siak, merupakan aspirasi masyarakat yang bermanfaat untuk mempermudah penduduk dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih memperdekat antara pemerintah dengan rakyat yang diperintahnya.

Kecamatan Tualang yang posisi pusat pemerintahannya ada di Kampung Perawang Barat yang kurang lebih jaraknya 80 km dari pusat pemerintahan Kabupaten yang dapat ditempuh melalui darat maupun sungai.

Kecamatan Tualang merupakan pemekaran dari Kecamatan Siak yang dimekarkan menjadi 14 Kecamatan, berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2001 yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Siak.

Tujuan dari pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat dan juga pemerintah Daerah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta untuk mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintahan Kecamatan. Maka dengan demikian, potensi yang ada di Kecamatan ini secara tidak langsung lebih terangkat dengan jangkauan pemerintah yang lebih dekat, jangkauan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan Kecamatan yang lama sebelum otonomi Daerah di tetapkan

1 Kondisi Wilayah

Wilayah Kecamatan Tualang pada umumnya tidak jauh dengan Wilayah Kabupaten yang terdiri dari dataran rendah dan berbukit-bukit dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podzolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

Tingkat kesuburan tanah di Kecamatan Tualang secara umum adalah sedang dengan sebagian besar lahan pertanian di gunakan untuk tanaman perkebunan terutama kelapa sawit, sedangkan topografi Kecamatan Tualang secara umum adalah datar.

Kecamatan Tualang secara umum berada pada daerah dataran dimana sektor industri pengolahan merupakan motor penggerak perekonomian yang sangat dominan tidak saja bagi Kecamatan Tualang sendiri tapi juga menjadi sektor andalan Kabupaten Siak. Sehingga tidaklah berlebihan jika kecamatan ini merupakan daerah industri. Kecamatan Tualang secara umum berada pada daerah

dataran dan sedikit berbukit, dengan mayoritas sektor pertanian yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit.

2 Letak dan Luas Wilayah

Kecamatan Tualang terletak antara $0^{\circ}32'-0^{\circ}51'$ Lintang Utara $101^{\circ}28'-101^{\circ}52'$ Bujur Timur dengan Luas keseluruhan Kecamatan Tualang yaitu $373,75 \text{ KM}^2$.

3 Keadaan Alam

Secara garis besar hutan yang ada di Kecamatan Tualang telah dijadikan lahan perkebunan, yang didominasi oleh tanaman sawit, dapat dilihat dari setiap sudut perbatasan Kecamatan Tualang dengan Kecamatan yang lainnya, terdapat perkebunan sawit dan karet, hal ini yang sebagian besar dimiliki oleh perusahaan swasta di Kecamatan Tualang dan perkebunan masyarakat.

Hutan boleh dikatakan tidak ada lagi, namun ada sebagian kecil hutan bekas tebangan atau bekas perladangan yang skala luasnya terpisah-pisah, dan ini sebagian milik masyarakat. Lahan yang belum tertanami tersebut baru dapat digunakan apabila pembukaan lahan dengan cara dibakar oleh masyarakat yang nantinya akan mereka tanami dengan tanaman perkebunan, seperti kelapa sawit, kelapa dan pinang.

Dan hutan saat sekarang ini yang dapat dilihat adalah hutan tanaman industri (HTI) milik perusahaan Arara abadi Grup PT. Indah Kiat. Yang banyak terdapat pada Desa Pinang Sebatang Timur dan Pinang Sebatang Barat. Umumnya tanaman ini adalah akasia yang menjadi tanaman hutan untuk kebutuhan perusahaan.

4 Batas Kecamatan

Kecamatan Tualang berbatasan dengan :

- a. Utara : Kecamatan Mandau, Minas
- b. Selatan : Kecamatan Kerinci Kanan, Pekanbaru
- c. Barat : Kecamatan Minas
- d. Timur : Sungai Mandau dan Koto Gasib

5 Sarana Pendidikan

Kabupaten Siak masih berusia sangat muda, dalam usia yang masih muda tersebut, tentu membutuhkan dukungan seluruh daerah bawahannya untuk berperan serta dalam proses pembangunan. Proses pembangunan akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas tentu saja merupakan hasil dari proses belajar mengajar yang selama ini dilakukan baik di wilayah Kecamatan Tualang atau diluar Kecamatan Tualang. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat dicerminkan dari jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh Kecamatan ini, baik pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah dan juga pendidikan tinggi. Namun demikian banyak kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Tualang untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia disamping terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan juga penyebaran penduduk yang tidak merata.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, peran pendidikan di Kecamatan Tualang dirasa perlu terus ditingkatkan, baik sarana dan prasarana maupun sumber tenaga pengajarnya sehingga dapat menunjang kelancaran proses belajar mengajar.

Pada tahun 2017 ini jumlah sekolah di Kecamatan Tualang mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai pada Sekolah Menengah Atas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: IV.1 : Banyaknya sekolah yang ada di Kecamatan Tualang berdasarkan Desa / Kelurahan Tahun 2016

No	Desa/ Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	SMK	MA	Ket
1.	Tualang	12	9	5	1	1	0	
2.	Perawang	9	11	2	0	1	0	
3.	Perawang Barat	11	6	4	1	2	1	
4.	Maredan	2	2	2	1	0	0	
5.	Maredan Barat	2	2	2	0	0	0	
6.	P.Sebatang	1	0	1	0	0	0	
7.	P. Sbt. Barat	2	3	2	0	0	0	
8.	P. Sbt. Timur	3	3	1	1	0	0	
9.	Tualang Timur	1	1	1	0	0	0	
	Jumlah	43	36	19	3	4	1	

Sumber : Kantor UPTD Pendidikan Kec.Tualang Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah TK sebanyak 43 sekolah, kemudian SD sebanyak 36 sekolah, SMP sebanyak 19 sekolah, sedangkan SMA,SMEA dan MA sebanyak 8 sekolah. Hal ini dapat dilihat bahwa

masih kurangnya sarana pendidikan, seperti belum adanya Perguruan Tinggi di Kecamatan Tualang sehingga siswa yang telah Tamat Pendidikan di Sekolah Menengah Atas harus ke luar kota untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi atau sejenisnya.

6 Sarana Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat tidak lepas dari perhatian Pemerintah terutama fasilitas kesehatan yang disediakan, disamping fasilitas kesehatan yang memadai tentu tak kalah pentingnya adalah tenaga kesehatannya. Kalau fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan telah mencukupi akan dapat menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Pada tahun 2017 di Kecamatan Tualang terdapat 2 Puskesmas, 7 Puskesmas Keliling dan 7 Puskesmas Pembantu. Sedangkan untuk pelayanan masyarakat di Kampung terdapat 7 Polindes dan 53 posyandu. Tenaga paramedis yang terdapat di Kecamatan Tualang adalah, 7 orang dokter gigi dan 11 orang dokter umum dengan 58 orang perawat. Sedangkan untuk pelayanan persalinan 43 orang bidan dan 27 orang dukun bayi.

C. VISI dan MISI Kecamatan Tualang

Visi Kecamatan Tualang 2017 – 2021 adalah Terwujudnya Kecamatan Tualang yang maju dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis, berbudaya melayu dan memiliki etos kerja di Kota Industri Tualang.

Sedangkan Misi kantor Kecamatan Tualang dalam selama 2017 - 2021 yaitu :

1. Meningkatkan Keimanan dan ketakwaan Pegawai
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar dapat bersaing Era MEA;
3. Meningkatkan etos kerja dan disiplin pegawai;
4. Meningkatkan inisiatif pegawai;
5. Mengembangkan pengalaman dan pengetahuan pegawai sesuai bidang keahliannya;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang bertanggung jawab;
7. Meningkatkan tertib administrasi perkantoran kampung.

D. Keadaan Pegawai Kantor Camat Tualang

1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan pegawai merupakan pondasi dasar bagi seseorang untuk dapat melaksanakan pekerjaannya didalam suatu organisasi, begitu juga dengan tingkat pendidikan pegawai yang berbeda antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya akan berengaruh terhadap permasalahan seorang pegawai tersebut dalam melaksanakan pekerjaan yang sedang dijalankan. Mengenai tingkat pendidikan pegawai pada Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.2: Keadaan Pegawai Pada Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak dilihat dari Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	1	3%
2	SLTP	-	-
3	SLTA	6	20%
4	D. III	2	7%
5	Perguruan Tinggi / Strata 1	19	63%
6	Strata 2 / S.II	2	7%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Kantor Camat Tualang, Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai kantor Camat Tualang kabupaten Siak yang paling banyak adalah pegawai yang berpendidikan S1(63 %), yang S2 sebanyak 2orang (7%) dan D3 sebanyak (7%) hal ini berarti penerapan prinsip pengarsipan yang baik sudah cukup dipahami betul oleh pegawai karena wawasan yang dimiliki pegawai yang baik, yang berpendidikan SLTA sebanyak 6 orang (20 %), SD sebanyak 1 orang (3%) dan pendidikan SLTP sebanyak (0%) hal ini menyandang makna bahwa masih terdapat beberapa pegawai yang berpendidikan masih rendah sehingga prosedur pengarsipan yang baik belum dikuasai betul oleh pegawai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai pada kantor camat Tualang mayoritas berpendidikan Strata 1(S1)

2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat atau Golongan

Pangkat atau golongan pegawai di setiap instansi pemerintahan mulai dari pangkat / golongan I sampai dengan golongan IV. Tingkatan golongan pegawai tersebut melambangkan dari keberhasilan dan prestasi kerja pada waktu melaksanakan pekerjaannya di suatu instansi. Dengan adanya golongan / kepangkatan yang ditempuh pegawai, sudah tentu akan mempengaruhi terhadap jabatan structural ataupun fungsional yang ada dalam instansi tersebut khususnya pada Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak. Berikut ini akan di kemukakan keadaan jumlah pegawai dilihat dari golongan atau kepangkatan yang telah di peroleh dari Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak yang dapat dilihat pada tabel.

II.3. berikut ini :

Tabel IV.3 : Keadaan Pegawai dilihat dari Golongan / Kepangkatan.

No	Golongan / Kepangkatan	Jumlah (org)	Persentase (%)
1	Golongan I a/b	2	7%
2	Golongan II a/b/c/d	14	46%
3	Golongan III a/b/c/d	12	40%
4	Golongan IV a/b	2	7%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Kantor Camat Tualang, Tahun 2017

Dari tabel II.3 diatas dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki pangkat / golongan I a/b sebanyak 2 orang (7%) hal ini dengan alasan masih adanya pegawai yang masih belum mengetahui betul tentang pengembangan karir pegawai karena rendahnya golongan pegawai tersebut dan untuk pangkat / golongan II a/b/c/d sebanyak 14 orang (46%), golongan III a/b/c sebanyak 12 orang (40%), dan golongan IV a/b sebanyak 2 orang (7%). Jumlah ini merupakan jumlah yang dominan sehingga pegawai tersebut diharapkan dapat mengetahui tentang pengembangan karir pegawai baik selaku staf yang memiliki golongan kerja yang cukup tinggi yang nantinya dapat tercapai sesuai visi dan misi

3. Keadaan Pegawai dilihat Berdasarkan Tingkat Umur

Dalam memberikan hasil analisa pada suatu permasalahan, umur seseorang cukup mempengaruhi dalam memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dari penelitian dapat dikatakan bahwa sebagian responden yang digunakan dalam penelitian ini tergolong usia produktif dan dewasa atau matang dalam berfikir, sehingga dianggap mampu membemrikan data-data dan informasi yang dibutuhkan.

Untuk mengetahui jumlah pegawai kantor Camat Tualang berdasarkan tingkat umur dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut ini :

Tabel IV.4 :Keadaan jumlah Pegawai dilihat dari Tingkatan Umur

No	Tingkat Umur (Thn)	Jumlah (org)	Persentase (%)
1	25 s/d 30	3	10%
2	30 s/d 39	15	50%
3	40 s/d 50 keatas	12	40%
	Jumlah	30	100%

Sumber :Kantor Camat Tualang, Tahun 2017

Dari tabel IV.4 di atas dapat diketahui bahwa pegawai yang berumur 40 s/d 50 merupakan umur yang paling dominan berjumlah 12 orang atau sebanyak (40 %), pegawai yang berumur 30 s/d 39 sebanyak 15 (50 %) alasannya dengan umur tersebut pegawai lebih giat dalam bekerja dan meniti karir, kemudian untuk pegawai yang berumur 25 s/d 30 tahun adalah sebanyak berjumlah 3 orang atau sebanyak (10%) merupakan pegawai yang paling sedikit sehingga pegawai tersebut yang memiliki umur tersebut dapat bekerja dengan giat dan tekun.

4. Keadaan Pegawai dilihat Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam memberikan hasil analisa pada suatu permasalahan, Jenis Kelamin cukup mempengaruhi dalam memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, untuk melihat jenis kelamin responden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.5 : Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	8	27%
2.	Perempuan	22	73%
	Jumlah	30	100%

Sumber :Kantor Camat Tualang, Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden adalah Laki-laki 8 (27%) dan jumlah responden perempuan adalah 22 atau 73 %.

E. Tugas dan Fungsi (Tupoksi)

Adapun Tugas dan Fungsi (Tupoksi) dalam pengembangan karir di Kantor Camat Tualang sangatlah diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan yaitu :

1. Tugas dan Fungsi Camat
 - a. Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh bupati;
 - b. Pelimpahan urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati;
 - c. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;

- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Kecamatan

- a. Sekretariat kecamatan mempunyai tugas pokok menyusun rencana, melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan yang meliputi administrasi kepegawaian keuangan, umum dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud ayat (1), sekretariat kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Pelaksanaan urusan umum;
 - b) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - c) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
 - d) Pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - e) Pelaksanaan urusan ketatausahaan kecamatan.
- c. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- d. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan ,perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;

- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

3. Tugas dan Fungsi seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kampung dan Kelurahan mempunyai tugas ;

- a. Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas pokok membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan Kampung ;
- b. Rincian tugas seksi pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai berikut :
 - a) Menyusun program dan kegiatan;
 - b) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Kampung;
 - c) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kampung;

Membantu koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana dalam wilayah kelurahan;
 - d) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perekonomian;

- e) Melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayahnya;
- f) Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daam wilayah kecamatan;
- g) Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan temu karya unit daerah kerja pembangunan;
- h) Merencanakan dan menyusun program pelaksanaan kegiatan perekonomian dan usaha kecil masyarakat lintas kelurahan;
- i) Melaksanakan pemantauan, evaluasi kelancaran produksi dan distribusi barang-barang kebutuhan masyarakat;
- j) Membantu instansi terkait dalam penataan dan pemuktahiran data masyaraka miskin;
- k) Memfasilitasi pembinaan organisasi kepemudaan dan olah raga lintas kelurahan;
- l) Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga keagamaan, pemberian bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah;
- m) Mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- n) Mengkoordinasikan bimbingan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
- o) Memfasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan kesehatan;

- p) Melaksanakan pembinaan kegiatan peningkatan partisipasi dan peranan wanita;
- q) Memberi saran dan pertimbangan kepada camat;
- r) Menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
- s) Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- t) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.

4. Tugas dan Fungsi seksi ketentraman dan ketertiban umum

- a. Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Rincian tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut :
 - a) Menyusun rencana dan program kerja dan kegiatan;
 - b) Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, ideology, kesatuan bangsa serta kemasyarakatan;
 - c) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dengan koordinasi apar keamanan yang terkait dalam wilayah kecamatan;
 - d) Menyelenggarakan fasilitasi partisipasi masyarakat dan pembinaan rukun warga dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- e) Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan kerukunan antar umat beragama;
- f) Membantu satuan polisi pamong praja dalam menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan bupati serta perundang-undangan;
- g) Memberi saran dan pertimbangan kepada camat;
- h) Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.

5. Tugas dan Fungsi Seksi Kesejahteraan sosial

- a. Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas pokok membantu camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberian kesejahteraan sosial kepada masyarakat.
- b. Rincian tugas seksi kesejahteraan sosial sebagai berikut :
 - a) Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman
 - b) Mengolah, merumuskan dan mengevaluasi program yang terkait dengan kesejahteraan rakyat;
 - c) Memfasilitasi kegiatan perkoperasian, dunia usaha, perdagangan dan perbankan;
 - d) Mendorong dan memberdayakan kelompok –kelompok tani, dan peternak.
 - e) Melayani dan memberdayakan organisasi keagamaan, pkk dan organisasi social kemasyarakatan lainnya;

- f) Mendorong dan memberdayakan organisasi profesi;
- g) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan kesejahteraan pada sekretaris kecamatan;
- h) Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- i) Menilai prestasi kerja bawahan untuk pembinaan karir;
- j) Membuat laporan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;

6. Tugas dan Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

- a. Seksi tata pemerintahan yang mempunyai tugas membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan;
- b. Rincian tugas seksi tata pemerintahan sebagai berikut :
 - a) Menyusun program dan kegiatan seksi tata pemerintahan;
 - b) Menyelenggarakan penilaian lomba kelurahan tingkat kecamatan;
 - c) Menyelenggarakan fasilitasi kerjasama antar kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar kelurahan;
 - d) Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil , inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayahnya;
 - e) Menilai prestasi kerja bawahan untuk pembinaan karier;

- f) Merencanakan dan menyusun serta menyelenggarakan program-program kegiatan pengembangan pemberdayaan masyarakat lintas kelurahan dalam wilayah kecamatan;
- g) Mempersiapkan bahan dan data untuk penyelenggaraan pemilihan umum;
- h) Mempersiapkan bahan dan data untuk pembinaan ideology negara, kesatuan bangsa dan peningkatan partisipasi politik masyarakat lintas kelurahan;
- i) Melaksanakan pembinaan keagrarian dalam rangka tertib pertanahan;
- j) Melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan dan memberikan solusi pemecahan;
- k) Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- l) Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.

7. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Umum

- a. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian
- b. Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a) Membuat rencana operasionalisasi program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b) Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan rumah tangga serta penggunaan kantor;
- c) Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan dinas serta rumah dinas kantor;
- d) Melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas;
- e) Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai., penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
- f) Mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas;
- g) Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
- h) Melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasian perlengkapan dinas;
- i) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas;

- j) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala;
 - k) Mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran pegawai;
 - l) Membuat laporan kepegawaian dan daftar urutan kepegawaian (duk) dan bahan pembuatan dp-3 setiap pegawai;
 - m) Mengevaluasi hasil program kerja;
 - n) Menyusun laporan hasil kegiatan;
 - o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Keuagandaan Kepegawaian
- a. Sub bagian keuangan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd);
 - b. Rincian tugasdimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a) Membuat rencana operasionalisasi program kerja sub bagian keuangan
 - b) Membuat daftar usulan kegiatan;
 - c) Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
 - d) Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- e) Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
- f) Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- g) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- h) Mengajukan spp untuk pengisian kas, spp beban tetap dan spp gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan bupati);
- i) Memeriksa pembayaran gaji skpp pegawai yang mutasi;
- j) Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
- k) Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani surat pertanggungjawaban (spj) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
- l) Mengevaluasi hasil program kerja;
- m) Membuat laporan hasil kegiatan;
- n) Melaksanakantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

F. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat diperlukan bagi pegawai untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.

Untuk melihat sarana dan prasarana yang ada di Kantor Camat Tualang dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel IV.6 : Sarana dan Prasarana pada Kantor Camat Tualang Tahun 2016

No	Jenis Sarana dan Prasana Kantor	Jumlah (Unit)
1	Komputer	5
2	Laptop	9
3	Mesin type	2
4	Meja rapat	1
5	Lemari Arsip	5
6	Filing Kabinet	10
7	Telephon	1
8	Mobil Dinas	3
9	Printer	7

Sumber : Kantor Camat Tualang, Tahun 2017

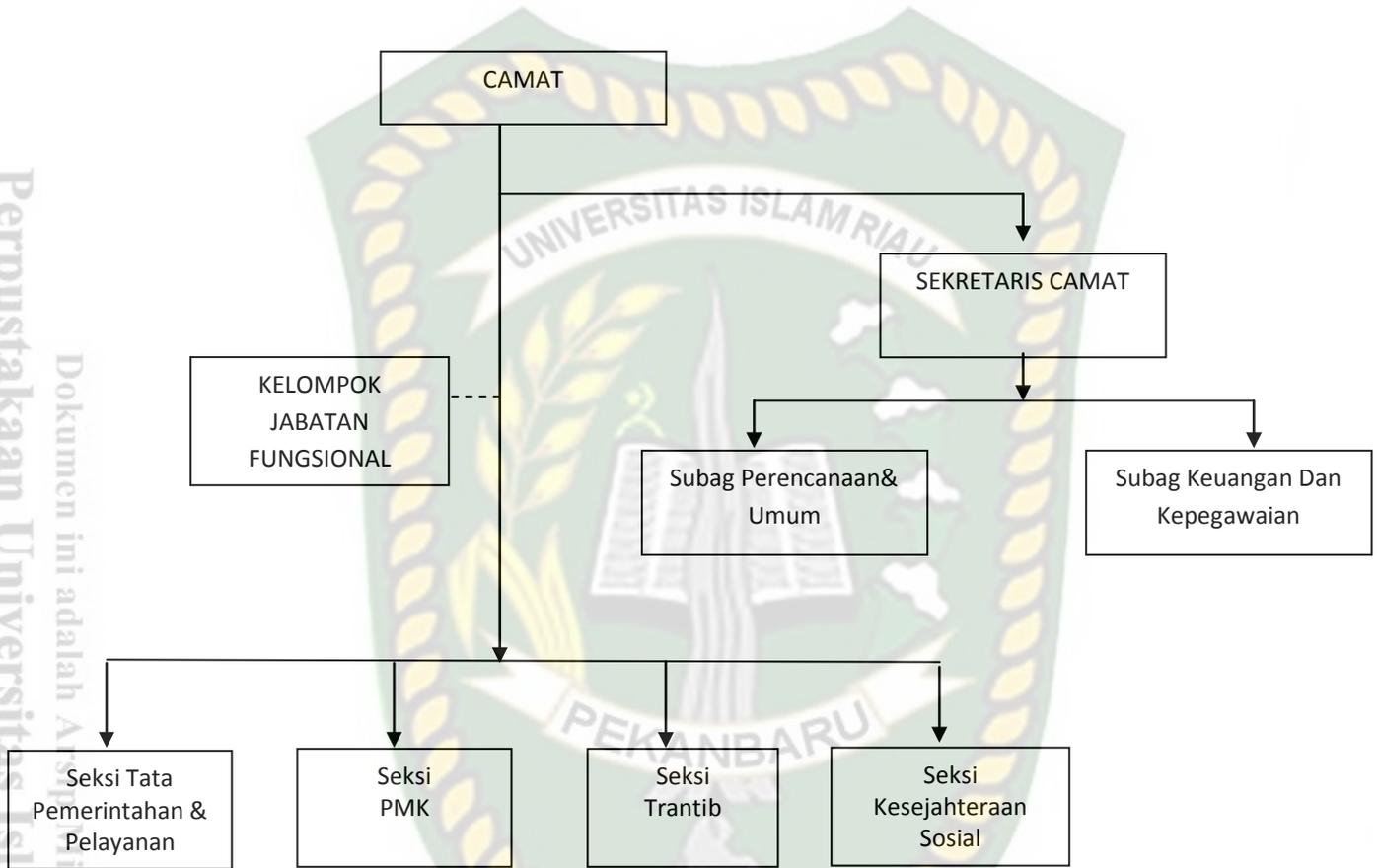
Dari tabel diatas dapat dilihat sejumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Camat Tualang yang diharapkan dapat menunjang pekerjaan dan karir pegawai karena tanpa adanya sarana dan prasarana maka semua pekerjaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

G. Struktur Organisasi

Selanjutnya untuk melihat bagan struktur organisasi dari Kecamatan Tualang dapat dilihat pada table berikut ini :

Peraturan Kabupaten Siak

Nomor : 32 Tahun 201



Sumber : Kantor Camat Tualang Tahun 2017

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas responden merupakan keterangan yang di peroleh dari responden berupa data yang di peroleh dari kuesioner yang di sebarakan peneliti yang berisikan tentang jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan responden. Sebelum pembahasan mengenai pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengatasi kenakalan remaja di kecamatan tualang kabupaten siak, maka terlebih dahulu akan di analisis hal yang bersangkutan dengan identitas responden yang di jadikan sampel pada penelitian ini.

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada responden dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel berikut ini:

Tabel V.1 : Jumlah Responden Dari Kasi Trantib, Pegawai Seksti Trantib, Ka Unit Reskrim, Anggota Reskrim Dan Masyarakat Di Kecamatan Tualang Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	40	67%
2	Perempuan	20	33%
	Jumlah	60	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden dari pegawai seksi trantib, anggota reskrim dan masyarakat jika dilihat dari jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki sebanyak 40 orang dengan persentase 67%, sedangkan untuk jenis kelamin perempuan berjumlah 20 orang dengan persentase 33 %.

2. Umur Responden

Usia merupakan tingkat kematangan pikiran seseorang dalam mengambil suatu keputusan dan juga dalam menjalankan tugas. Seperti yang diketahui bahwa Kasi Trantib, Anggota Seksi Trantib, Ka Unit Reskrim, Anggota Reskrim Dan Masyarakat yang lebih tua umurnya maka akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan juga dalam menjalankan tugas yang diberikan. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai umur responden maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2 : Jumlah Responden Dari Kasi Trantib, Pegawai Seksi Trantib, Ka Unit Reskrim, Anggota Reskrim Dan Masyarakat Di Kecamatan Tualang Berdasarkan Tingkat Umur

NO	Umur Responden	Jumlah	Persentase
1	≤ 29 tahun	21	34%
2	30-39 tahun	21	34%
3	40-49 tahun	14	25%
4	≥ 50 tahun	4	7%
Jumlah		60	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2019

Berdasarkan tabel di atas tingkat umur responden beraneka ragam. Untuk usia ≤ 29 tahun berjumlah 21 orang dengan hasil persentase 34%, untuk usia 30-39 tahun berjumlah 21 orang dengan hasil persentase 34%, untuk usia 40-49 tahun

berjumlah 14 orang dengan hasil persentase 25%, dan yang berusia ≥ 50 tahun berjumlah 4 orang dengan hasil persentase 7%.

3. Pendidikan

Pendidikan juga berpengaruh dalam mengambil keputusan dan juga dalam menjalankan tugas. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka makin tinggi pulak pikiran seseorang. Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini memiliki tingkat yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan responden maka dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.3 : Jumlah Responden Dari Kasi Trantib, Pegawai Seksi Trantib, Ka Unit Reskri, Anggota Reskrim Dan Masyarakat Di Kecamatan Tualang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	-	-
2	SLTP	2	3%
3	SLTA	33	54%
4	D3	7	12%
5	S1	18	31%
6	S2	-	-
Jumlah		60	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2019

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa pendidikan responden pada penelitian ini yang lebih tertinggi berada pada tingkat SLTA yang berjumlah 33 orang dengan hasil persentase berjumlah 54% dan S1 yang berjumlah 18 orang dengan hasil persentase berjumlah sebanyak 31%, sedangkan tingkat pendidikan terendah berada pada tingkat pendidikan SLTP yang berjumlah 2 orang dengan hasil persentase 3% dan D3 sebanyak 7 orang dengan hasil persentase yang di peroleh yaitu sebanyak 12%.

B. Hasil Penelitian dan pembahasan

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses dimana seseorang atau beberapa orang menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Dalam suatu organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada pegawai harus dengan komunikasi.

Dalam penelitian ini, Komunikasi merupakan salah satu indikator yang terjadi dalam pelaksanaan koordinasi antara camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Tabel V.4 a : Distribusi Jawaban Responden Dari Pegawai Seksi Trantib Kantor Kecamatan Tualang Tentang Indikator Komunikasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Memberikan Informasi	7	6	1	14
2	Ada Tidaknya Alur Informasi	5	9	0	14
3	Ada Tidaknya Teknologi Informasi	10	4	0	14
Jumlah		22	19	1	42

Sumber: Data Olahan Peneliti 2019

Dari tabel di atas diketahui bahwa tanggapan responden untuk indikator pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam melakukan komunikasi yang di nilai pada item pertama yaitu memberikan informasi sebanyak 7 orang menjawab terlaksana, sebanyak 6 orang menjawab cukup terlaksana, dan sebanyak 1 orang mengatakan kurang terlaksana.

Pada item kedua, ada tidaknya alur informasi sebanyak 5 orang menjawab terlaksana, 9 orang menjawab cukup terlaksana dan sebanyak 0 orang menjawab kurang terlaksana. Pada item ke tiga yaitu ada tidaknya teknologi informasi , sebanyak 10 orang menjawab terlaksana, sebanyak 4 orang menjawab cukup terlaksana dan sebanyak 0 orang yang menjawab kurang terlaksana.

Maka berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator pertama yang membahas tentang “komunikasi” yaitu responden yang memilih “Terlaksana” dengan jumlah 22 responden pegawai. Adapun alasan yang di berikan oleh responden yang berasal dari pegawai Seksi Trantib adalah masalah komunikasi terutama dalam pemberian informasi itu sudah di lakukan dengan adanya sosialisasi kesekolah-sekolah terutama kepada remaja selain itu juga pemberitahuan di media internet.

Selanjutnya di ikuti dengan jawaban “Cukup Terlaksana” yaitu dengan jumlah responden 19 orang pegawai , alasan yang di berikan oleh pegawai Seksi Trantib adalah berdasarkan situasi di lapangan, dimana proses pemberian informasi dan penggunaan teknologi dalam penyampaian tentang masalah

kenakalan remaja di kecamatan tualang ini memang sudah di lakukan oleh pihak kecamatan tetapi belum maksimal. Dan jawaban yang terakhir adalah dengan kategori “Kurang Terlaksana” dengan jumlah responden sebanyak 1 orang responden.

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang didapat pada masing-masing jawaban responden pegawai Seksi TrantibKantor Kecamatan Tualang pada penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut :

Tabel V.4 b : Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Pegawai Seksi Trantib Kantor Kecamatan Tualang Tentang Indikator Komunikasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
		3	2	1	
1	Memberikan Informasi	21	12	1	34
2	Ada Tidaknya Alur Informasi	15	18	0	33
3	Ada Tidaknya Teknologi Informasi	30	8	0	38
TOTAL SKOR					105

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

$$\text{Skor tertinggi} = 14 \times 3 = 42$$

$$\text{Skor indikator} = 42 \times 3 = 126$$

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor indikator}} \times 100 = \frac{105}{126} \times 100 = 83\%$$

Berdasarkan tabel di atas setelah di analisis dengan menggunakan rumus maka jawaban responden mengenai komunikasi sebanyak 83% dengan kategori ‘Terlaksana’.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Tualang yaitu bapak Rudi Vivi Hendri, ST pada tanggal 27 september 2019 menyatakan bahwa :

“Menurut beliau, mengenai komunikasi sudah cukup baik karena dalam berkoordinasi ini harus memiliki komunikasi yang baik agar koordinasi yang di laksanakan berjalan sesuai target dan di laksanakan berdasarkan alur komunikasi yang ada. Beliau juga ada berkomunikasi dengan masyarakat baik itu secara langsung maupun tidak langsung mengenai kenakalan remaja di kecamatan tualang ini seperti melakukan sosialisasi di sekolah dan di kalayak ramai”.

Dari wawancara dengan Kasi Trantib, dapat di simpulkan bahwa komunikasi terhadap pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah terlaksanakan dengan baik karena mereka sudah melakukan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung tentang kenakalan remaja yang ada di Kecamatan Tulang Kabupaten Siak ini.

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang penulis lakukan di lokasi penelitian serta data yang di berikan oleh responden dari indikator komunikasi, sesuai dengan peneliti jumpai di lapangan bahwa pihak Kecamatan dan Polsek Kecamatan Tualang telah melakukan salah satu indikator koordinasi yaitu komunikasi dengan memberikan sosialisasi kepada anak-anak di sekolah dan juga melakukan razia.

Dari uraian data tabel di atas, data hasil wawancara atau kuisioner serta pengamatan di lapangan dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa komunikasi merupakan penyampaian suatu informasi baik itu pesan, ide atau gagasan kepada pihak yang berkaitan agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.

Komunikasi yang di lakukan oleh camat dan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yaitu memberikan informasi, ada tidaknya alur informasi, ada tidaknya teknologi informasi. Pihak Kecamatan dan Polsek Tualang Kabupaten Siak dalam mengadakan informasi yang telah di uraikan di atas, walaupun masih memiliki kekurangan dalam melakukan indikator komunikasi, akan tetapi indikator komunikasi ini menurut penulis berada pada ketegori cukup terlaksana, karena pihak kecamatan dan kepolisian telah melakukan komunikasi seperti berkomunikasi dalam melakukan pertemuan untuk mengadakan suatu rapat atau razia, memberikan suatu informasi mengenai kenakalan remaja di sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, walaupun tidak terlaksana dengan rutin.

Sedangkan tanggapan responden dari anggota reskrim Kecamatan Tualang mengenai pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat di lihat dari tabel V.5 adalah sebagai berikut :

Tabel V.5 a : Distribusi Jawaban Responden Dari Anggota Reskrim Polsek Tualang Tentang Indikator Komunikasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Memberikan Informasi	9	2	0	11
2	Ada Tidaknya Alur Informasi	8	3	0	11
3	Ada Tidaknya Teknologi Informasi	9	2	0	11
Jumlah		26	7	0	33

Sumber : Data Olahan Peneliti 2019

Berdasarkan tabel di atas tentang tanggapan responden untuk indikator pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam melakukan komunikasi yang di dinilai dari item pertama yaitu memberikan informasi sebanyak 9 orang responden menjawab terlaksana, sebanyak 2 orang menjawab cukup terlaksana dan 0 responden yang menjawab kurang terlaksana.

Pada item kedua, ada tidaknya alur informasi sebanyak 8 responden menjawab terlaksana, 3 responden menjawab cukup terlaksana dan 0 orang responden menjawab kurang terlaksana. Pada item ketiga yaitu ada tidaknya teknologi informasi sebanyak 9 orang menjawab terlaksana, sebanyak 2 orang menjawab cukup terlaksana, dan 0 orang yang menjawab tidak terlaksana.

Dari hasil tanggapan responden di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator komunikasi yaitu responden yang memilih jawaban pada kategori “Terlaksana” jumlahnya 26 responden anggota reskrim,

alasan pemilihan jawaban pada kategori ini adalah karena pemberian informasi mengenai kenakalan remaja itu sudah menjadi kewajiban, dan menjadi aturan terutama dalam pelaksanaan koordinasi ini. komunikasi yang di lakukan yaitu seperti melakukan pertemuan dengan pihak kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan razia. Dan memberikan informasi-informasi melalui sosialisasi mengenai kenakalan remaja.

Sementara itu untuk yang menjawab “Cukup Terlaksana” jawaban responden sebanyak 7 responden anggota reskrim hal ini di dasari dengan alasan yang di berikan oleh responden anggota reskrim yang mengatakan bahwa pelaksanaan komunikasi ini terutama dalam penyampaian informasi seperti mengadakan sosialisasi itu memang ada di lakukan tetapi tidak dilakukan secara keseluruhan.

Dan yang terakhir adalah jawaban dengan kategori “Kurang Terlaksana” dimana untuk jawaban ini responden yang memberikan jawabannya adalah sebanyak 0 orang responden anggota reskrim.

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang di dapat pada masing-masing jawaban responden anggota ReskrimPolsek Tualang pada penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut

:

Tabel V.5 b : Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Anggota Reskrim Polsek Tualang Tentang Indikator Komunikasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
		3	2	1	
1	Memberikan Informasi	27	4	0	31
2	Ada Tidaknya Alur Informasi	24	6	0	30
3	Ada Tidaknya Teknologi Informasi	27	4	0	31
TOTAL SKOR					92

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Skor tertinggi = $11 \times 3 = 33$

Skor indikator = $33 \times 3 = 99$

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor indikator}} \times 100 = \frac{92}{99} \times 100 = 93\%$$

Berdasarkan tabel di atas setelah di analisis dengan menggunakan rumus maka jawaban responden mengenai komunikasi memperoleh hasil persentase 93% dengan kategori ‘Terlaksana’.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ka Unit Reskrim Brigadir Glori pada tanggal 28 september 2019 menyatakan bahwa :

“Menurut beliau masalah komunikasi sudah terlaksana dengan baik, karena inti dalam berkoordinasi ini adalah komunikasi tanpa adanya komunikasi maka koordinasi ini tidak akan ada. Dalam masalah kenakalan remaja ini komunikasi yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan membuat suatu kebijakan tentang bagaimana langkah-langkah untuk mengantisipasi akan kenakalan remaja di kecamatan tualang ini dan melaksanakan patroli di seputaran tualang ini”.

Dari wawancara dengan di atas dapat di simpulkan bahwa komunikasi terhadap pelaksanaan koordinasi dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang sudah terlaksana dengan baik karena komunikasi adalah kunci dalam melakukan suatu koordinasi.

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang penulis lakukan di lokasi penelitian serta data yang di berikan oleh responden dari indikator komunikasi, sesuai dengan peneliti jumpai di lapangan bahwa pihak kecamatan dan polsek Kecamatan Tualang kurang maksimal dalam memberikan suatu motivasi dan pengarahan kepada remaja agar terhindar dan menjauh kasus dari kenakalan remaja.

Dari uraian data tabel di atas, data hasil wawancara atau kuisioner serta pengamatan di lapangan dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa komunikasi merupakan penyampaian suatu informasi baik itu pesan, ide atau gagasan kepada pihak yang berkaitan agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.

Komunikasi yang di lakukan oleh pihak camat dan kepolisian Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yaitu memberikan informasi, ada tidaknya alur informasi, ada tidaknya teknologi informasi. Pihak kecamatan dan polsek Tualang Kabupaten Siak dalam melaksanakan informasi yang telah di uraikan di atas, walaupun masih memiliki kekurangan dalam melakukan indikator komunikasi, akan tetapi indikator komunikasi ini berada pada ketegori cukup terlaksana, karena pihak camat dengan kepolisian telah berupaya untuk memberikan suatu

informasi mengenai kenakalan remaja dan memberikan pengarahan akan dampak bahayanya dari kenakalan remaja itu walaupun tidak banyak yang mengetahui.

Sedangkan tanggapan responden dari masyarakat mengenai pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat di lihat dari tabel V.6 adalah sebagai berikut :

Tabel V.6 a : Distribusi Jawaban Responden Dari Masyarakat Tualang Tentang Indikator Komunikasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Memberikan Informasi	5	21	9	35
2	Ada Tidaknya Alur Informasi	4	21	10	35
3	Ada Tidaknya Teknologi Informasi	5	23	7	35
Jumlah		14	65	26	105

Sumber : Data Olahan Peneliti 2019

Berdasarkan data tabel di atas tentang tanggapan responden terhadap indikator komunikasi dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak di nilai dari item pertama yaitu memberikan informasi yang menjawab terlaksana sebanyak 5 orang, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 21 orang, dan sebanyak 9 orang menjawab kurang terlaksana.

Pada item kedua yaitu ada tidaknya alur informasi sebanyak 4 orang menjawab terlaksana, sebanyak 21 orang menjawab cukup terlaksana, dan sebanyak 10 orang menjawab kurang terlaksana. Pada item ketiga yaitu ada tidaknya teknologi sebanyak 5 orang menjawab terlaksana, sebanyak 23 orang menjawab cukup terlaksana, dan sebanyak 7 orang menjawab kurang terlaksana.

Dari hasil tanggapan responden di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator pertama yang membahas tentang komunikasi yaitu responden yang memilih jawaban pada kategori “Terlaksana” jumlahnya adalah sebanyak 14 responden masyarakat, alasannya menurut mereka pihak Kecamatan dan Polsek ada memberikan suatu informasi mengenai kenakalan remaja seperti di media internet dan juga media sosial, sementara itu untuk jawaban “Cukup Terlaksana” jawaban responden adalah sebanyak 26 responden masyarakat hal ini didasari dengan alasan bahwa pihak kecamatan dengan Polsek Kecamatan Tualang sudah memberikan informasi melalui teknologi, akan tetapi tidak semua masyarakat yang bisa menggunakan teknologi tersebut. Selanjutnya yang menjawab “Kurang Terlaksana” rata-rata mereka mengatakan bahwa mereka kurang mengetahui mengenai informasi kenakalan remaja, alur yang digunakan serta mereka tidak mengerti dengan teknologi yang memberikan informasi mengenai kenakalan remaja yang ada di Kecamatan Tualang.

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang didapat pada masing-masing jawaban responden masyarakat Tualang pada penelitian ini, dan adapun hasil yang didapat adalah sebagai berikut :

Tabel V.6 b : Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Masyarakat Tualang Tentang Indikator Komunikasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
		3	2	1	
1	Memberikan Informasi	15	42	9	66
2	Ada Tidaknya Alur Informasi	12	42	10	64
3	Ada Tidaknya Teknologi Informasi	15	46	7	68
TOTAL SKOR					198

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Skor tertinggi = $35 \times 3 = 105$

Skor indikator = $105 \times 3 = 315$

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor indikator}} \times 100 = \frac{198}{315} \times 100 = 63\%$$

Berdasarkan tabel diatas setelah di analisis dengan menggunakan rumus skala likert tanggapan responden masyarakat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak pada item “komunikasi” memperoleh hasil persentase rentang nilai 63% dengan kategori “cukup terlaksana”.

Menurut masyarakat Kecamatan Tualang pemerintah kecamatan kurang memberikan informasi mengenai kenakalan remaja yang ada di Kecamatan Tualang ini, dan kurang mendapatkan sosialisasi dan penanganan langsung dalam upaya pencegahan kenakalan remaja ini. Sehingga masalah kenakalan remaja yang terdapat di Kecamatan Tualang ini berkurang dengan lambat. Adapun pemberian informasi yang di berikan oleh pihak kecamatan Tualang dan juga

pihak kepolisian seperti melalui media internet tetapi tidak semua masyarakat yang paham dan menggunakan teknologi seperti itu. Sehingga masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui mengenai permasalahan kenakalan remaja tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dari pegawai seksi trantib, anggota reskrim, dan masyarakat di atas mengenai indikator “Komunikasi” maka dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di kecamatan tualang kabupaten siak berada pada kategori cukup terlaksana. Karena pihak kecamatan dan pihak kepolisian telah melaksanakan indikator komunikasi ini tetapi belum terlaksana dengan maksimal. Bentuk komunikasi yang di lakukan oleh kasi trantib dan unit reskrim ini ada secara lisan dan juga tulisan, secara lisan melalui via telvon atau ketemu langsung dengan datang ke kantor. Dan secara tulisan yaitu seperti surat pemberitahuan untuk melakukan razia.

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Pemahaman dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan koordinasi menjadi penting dalam upaya kesadaran akan pentingnya koordinasi. Kemampuan pemimpin memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah di canangkan. Peran pemimpin di dalam koordinasi sangat penting guna membantu terwujudnya kesadaran tersebut.

Tabel V.7 a : Distribusi Jawaban Responden Dari Pegawai Seksi Trantib Kantor Kecamatan Tualang Tentang Indikator Kesadaran Pentingnya Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Tingkat Pengetahuan Pelaksanaan Terhadap Koordinasi	6	7	1	14
2	Keselarasan Aktivitas	9	5	0	14
Jumlah		15	12	1	28

Sumber : Data Olahan Peneliti 2019

Berdasarkan data tabel di atas tentang tanggapan responden terhadap indikator kesadaran pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang di nilai dari item pertama yaitu tingkat pengetahuan terhadap pelaksanaan koordinasi, sebanyak 6 orang menjawab terlaksana, sebanyak 7 orang menjawab cukup terlaksana, dan sebanyak 1 orang menjawab kurang terlaksana.

Pada item kedua, keselarasan aktivitas, sebanyak 9 orang yang menjawab terlaksana, sebanyak 5 orang menjawab cukup terlaksana, dan yang menjawab kurang terlaksana tidak ada.

Berdasarkan hasil tanggapan di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator kedua yang membahas tentang kesadaran pentingnya koordinasi yaitu responden yang memilih jawaban pada kategori “Terlaksana” jumlahnya sebanyak 15 responden pegawai Seksi Trantib, alasannya

karena koordinasi ini merupakan suatu kebijakan yang harus di laksanakan dengan baik dan khususnya bagi pelaksana harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai pentingnya koordinasi terutama dalam hal kenakalan remaja, agar masalah tersebut dapat teratasi sebaik mungkin, sementara itu untuk jawaban “Cukup Terlaksana” jawaban responden adalah sebanyak 12 responden pegawai Seksi Trantib, hal ini di dasari dengan alasan yang di berikan oleh responden pegawai seksi trantib yang mengatakan bahwa kesadaran pentingnya koordinasi itu berdasarkan diri masing-masing, apabila kesadaran itu di terapkan oleh semua pihak maka masalah-masalah itu akan teratasi. Dan yang terakhir adalah jawaban dengan kategori “Cukup Terlaksana” adalah sebanyak 1 responden.

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang di dapat pada masing-masing jawaban responden pegawai seksi trantib kantor Kecamatan Tualang pada penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut :

Tabel V.7 b : Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Pegawai Seksi Trantib Kantor Kecamatan Tualang Tentang Indikator Kesadaran Pentingnya Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
		3	2	1	
1	Tingkat Pengetahuan Pelaksanaan Terhadap Koordinasi	18	14	1	32
2	Keselarsan aktivitas	27	10	0	37
SKOR					69

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Skor tertinggi = $14 \times 3 = 42$

Skor indikator = $42 \times 2 = 84$

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor indikator}} \times 100 = \frac{69}{84} \times 100 = 82\%$$

Berdasarkan tabel di atas setelah di analisis menggunakan rumus maka jawaban responden mengenai komunikasi memperoleh hasil persentase sebanyak 82% dengan kategori ‘Terlaksana’.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Tualang yaitu bapak Rudi Vivi Hendri, ST pada tanggal 27 september 2019 menyatakan bahwa :

“Menurut beliau mengenai pentingnya kesadaran koordinasi yaitu dalam hal kenakalan remaja ya sangat penting salah satunya adalah kita setiap bulan mengadakan rapat koordinasi unsur pimpinan kecamatan melalui rapat UPIKA yang di lakukan sebulan sekali di situ terdapat kepala desa masing-masing lalu berkoordinasi apa isu dari wilayah masing-masing. Maka dari SOP rapat itu kita buat dan kita memberikan keputusan lalu kita atur jadwal untuk melakukan sosialisasi. Tetapi rapat ini tidak seutuhnya di lakukan sebulan sekali ada juga yang tidak di laksanakan tergantung pada laporan yang di terima”.

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa kesadaran pentingnya koordinasi itu telah di laksanakan dengan baik oleh pihak kecamatan dengan kepolisian dalam hal seperti melakukan rapat bulanan, walaupun kegiatan ini tidak di laksanakan setiap bulannya tetapi di laksanakan berdasarkan laporan dari warga.

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang penulis lakukan di lokasi penelitian serta data yang di berikan oleh responden dari indikator kesadaran pentingnya koordinasi bahwa indikator tersebut telah di lakukan walaupun tidak secara maksimal seperti dari hasil wawancara yang diperoleh oleh kasi trantib yang mana mereka hanya melakukan suatu rapat dan sosialisasi kepada perwakilan masyarakat. Sebaiknya pihak kecamatan juga ada memberikan sosialisasi dan penanganan langsung di lapangan terbuka untuk umum mengenai kasus kenakalan remaja yang sudah marak terjadi di kecamatan tualang ini.

Dari uraian data tabel di atas , data hasil wawancara atau kuisisioner serta hasil pengamatan di lapangan dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa kesadaran pentingnya koordinasi merupakan kemampuan untuk memberikan pengaruh konstruktif kepada pihak yang berkaitan untuk melakukan usaha kooperatif mencapai tujuan yang telah dicanangkan.

Kesadaran pentingnya koordinasi yang di lakukan oleh pihak kecamatan dan polsek Tualang yaitu tingkat pengetahuan dalam koordinasi, keselarasan aktivitas. Pihak kecamatan tualang dan polsek tualang dalam kesadaran pentingnya koordinasi yang telah di uraikan di atas, walaupun masih ada kekurangan dalam melakukan indikator kesadaran pentingnya koordinasi, akan tetapi indikator kesadarannya koordinasi menurut penulis berada pada kategori cukup terlaksana, karena telah melakukan tugasnya walaupun belum maksimal seperti telah melakukan penyampaian atau sosialisasi melalui perwakilan RT walaupun tidak langsung di sampaikan kepada masyarakat.

Sedangkan tanggapan responden dari anggota Reskrim Polsek Tualang tentang indikator kesadaran pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat di lihat dari tabel V.8 berikut ini :

Tabel V.8 a : Distribusi Jawaban Responden Dari Anggota Reskrim Polsek Tualang Tentang Indikator Kesadaran Pentingnya Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Tingkat Pengetahuan Pelaksanaan Terhadap Koordinasi	8	3	0	11
2	Keselarasan Aktivitas	7	4	0	11
Jumlah		16	6	0	22

Sumber : Data Olahan Peneliti 2019

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden tentang indikator kesadaran pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dilihat dari item penilaian yang pertama yaitu tingkat pengetahuan pelaksanaan terhadap koordinasi yaitu sebanyak 8 orang menjawab terlaksana, sebanyak 3 orang menjawab cukup terlaksana, dan yang menjawab kurang terlaksana 0 orang.

Selanjutnya pada item kedua keselarasan aktivits yaitu sebanyak 7 orang menjawab terlaksana, sebanyak 4 orang menjawab cukup terlaksana, dan sebanyak 0 orang yang menjawab kurang terlaksana.

Dari hasil tanggapan responden di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke dua yang membahas tentang kesadaran pentingnya koordinasi yaitu jawaban dengan kategori “Terlaksana” dengan jumlah 16 responden anggota reskrim, adapun yang penulis dapat kan dari responden tersebut adalah bahwa kesadaran pentingnya koordinasi itu adalah suatu kewajiban bagi yang melaksanakannya karena itu merupakan sudah tuntutan tugas dan harus di laksanakan semaksimal mungkin. Seperti melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah itu sudah termasuk suatu kesadaran dalam pelaksanaan koordinasi untuk mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang, supaya remaja-remaja yang ada di Kecamatan ini bisa terjauh dari hal-hal yang berdampak negatif, yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang di sekitar.

Selanjutnya di ikuti dengan kategori jawaban “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden sebanyak 6 responden anggota reskrim, alasan yang di berikan oleh responden reskrim yaitu kesadaran pentingnya koordinasi ini memang harus di lakukan agar tujuan yang hendak di capai itu terlaksana. Sementara itu, tidak ada responden yang memberikan tanggapan pada pilihan dengan kategori jawaban “Kurang Terlaksana”

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang di dapat pada masing-masing jawaban responden anggota Reskrim Polsek Tualang pada penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut :

Tabel V.8 b : Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Anggota Reskrim Polsek Tualang Tentang Indikator Kesadaran Pentingnya Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
		3	2	1	
1	Tingkat Pengetahuan Pelaksanaan Terhadap Koordinasi	24	6	0	30
2	Keselarsan aktivitas	21	8	0	29
SKOR					59

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Skor tertinggi = $11 \times 3 = 33$

Skor indikator = $33 \times 2 = 66$

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor indikator}} \times 100 = \frac{59}{66} \times 100 = 89\%$$

Berdasarkan tabel di atas setelah di analisis menggunakan rumus maka jawaban responden mengenai kesadaran pentingnya koordinasi memperoleh hasil persentase sebanyak 89% dengan kategori ‘Terlaksana’.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ka Unit Reskrim Brigadir Glori pada tanggal 28 september 2019 menyatakan bahwa :

“Kalau mensosialisasikan itu kita berkoordinasi dengan pihak kecamatan terus objek yang di koordinasikan itu seperti pergi kesekolah-sekolah yang membahas mengenai dari kenakalan remaja itu dan perkumpulan orang ramai”.

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa kesadaran pentingnya koordinasi telah cukup terlaksana dengan melakukan kegiatan sosialisasi kesekolah-sekolah dan juga dikhalayak ramai.

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang penulis lakukan di lokasi penelitian serta data yang di berikan oleh responden dari indikator kesadaran pentingnya koordinasi bahwa indikator tersebut telah di lakukan walaupun tidak secara maksimal seperti dari hasil wawancara yang diperoleh oleh kasi trantib yang mana mereka hanya melakukan suatu sosialisasi kepada perwakilan masyarakat. Sebaiknya pihak kecamatan memberikan sosialisasi dan penanganan di lapangan dan terbuka untuk umum mengenai kasus kenakalan remaja yang sudah marak terjadi di kecamatan tualang ini.

Dari uraian data tabel di atas , data hasil wawancara atau kuisisioner serta hasil pengamatan di lapangan dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa kesadaran pentingnya koordinasi merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam melakukan suatu hal, karena adanya level motivasional yang terkandung keinginan atau kemauan dan kemampuan seseorang untuk mendemonstrasikan kinerja efektif.

Kesadaran pentingnya koordinasi yang di lakukan oleh pihak kecamatan dan polsek Tualang yaitu tingkat pengetahuan dalam koordinasi, keselarasan aktivitas. Pihak kecamatan tualang dan polsek tualang dalam kesadaran pentingnya koordinasi yang telah di uraikan di atas, walaupun masih ada kekurangan dalam melakukan indikator kesadaran pentingnya koordinasi, akan tetapi indikator kesadarannya koordinasi menurut penulis berada pada kategori cukup terlaksana, karena telah melakukan tugasnya seperti telah melakukan penyampaian atau sosialisasi melalui perwakilan RT walaupun tidak langsung di sampaikan kepada masyarakatnya.

Sedangkan tanggapan responden dari masyarakat Tualang tentang indikator kesadaran pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat di lihat dari tabel V.9 berikut ini :

Tabel V.9 a : Distribusi Jawaban Responden Dari Masyarakat Tualang Tentang Indikator Kesadaran Pentingnya Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Tingkat Pengetahuan Pelaksanaan Terhadap Koordinasi	0	31	4	35
2	Keselarasan Aktivitas	3	23	9	35
Jumlah		3	54	13	70

Sumber : Data Olahan Peneliti 2019

Berdasarkan tabel di atas tanggapan responden tentang indikator kesadaran pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi antara camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak di lihat dari item penilaian yang pertama yaitu tingkat pengetahuan pelaksanaan terhadap koordinasi ketahui sebanyak 0 orang responden menjawab terlaksana, sebanyak 31 orang menjawab cukup terlaksana, dan sebanyak 4 orang yang menjawab kurang terlaksana.

Selanjutnya pada item kedua keselarasan aktivitas sebanyak 3 orang menjawab terlaksana, sebanyak 23 orang menjawab cukup terlaksana, dan sebanyak 9 orang yang menjawab kurang terlaksana.

Dari hasil tanggapan responden di atas dapat di lihat bahwa jawaban terhadap indikator kesadaran pentingnya koordinasi yaitu jawaban dengan kategori “Terlaksana” dengan jumlah 3 responden masyarakat, adapun alasan yang penulis dapatkan dari responden tersebut adalah bahwa kesadaran pentingnya koordinasi sudah di laksanakan oleh pihak camat dengan kepolisian, selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden sebanyak 54 responden masyarakat, alasan yang di berikan oleh responden masyarakat adalah kesadaran pentingnya koordinasi ini belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal seperti dalam pelaksanaan rapat yang tidak di laksanakan secara rutin serta kurangnya sosialisasi mengenai kasus kenakalan remaja dan harus ada peningkatan agar kenakalan remaja yang ada di kecamatan tualang ini bisa teratasi. Dan jawaban yang terakhir adalah dengan kategori “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden 6 responden masyarakat dan alasan yang di berikan oleh responden masyarakat tersebut adalah menurut mereka jika di lihat tingkat kenakalan remaja di kecamatan tualang ini belum berkurang maka kesadaran pentingnya koordinasi yang di lakukan oleh pihak kecamatan dan polsek masih rendah dan belum terlaksana dengan baik.

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang di dapat pada masing-masing jawaban respon masyarakat tualang pada penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut :

TabelV.9b: Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Masyarakat Tualang Tentang Indikator Kesadaran Pentingnya Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

NO	Item penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
		3	2	1	
1	Tingkat Pengetahuan Pelaksanaan Terhadap Koordinasi	0	62	4	66
2	Keselarsan aktivitas	9	46	9	64
SKOR					130

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Skor tertinggi = $35 \times 3 = 105$

Skor indikator = $105 \times 2 = 210$

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor indikator}} \times 100 = \frac{130}{210} \times 100 = 62\%$$

Berdasarkan tabel di atas setelah di analisis menggunakan rumus maka jawaban responden mengenai kesadaran pentingnya koordinasi memperoleh hasil sebanyak 62% dengan kategori ‘Cukup Terlaksana’.

Berdasarkan data yang di peroleh dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak di katakan cukup terlaksana karena berdasarkan informasi yang diperoleh yaitu mengenai indikator kesadaran pentingnya koordinasi yaitu dengan mengadakan rapat unsur pimpinan kecamatan atau UPIKA yang di lakukan sekali sebulan yang di hadiri oleh kepala desa masing-masing dan di dalam rapat itu membahas mengenai apa isu yang ada di wilayah masing-masing tentang

kenakalan remaja. tetapi rapat tersebut tidak terlaksana setiap bulan tetapi hanya berdasarkan laporan yang di terima.

Berdasarkan hasil analisis yang di peroleh dari pegawai seksi trantib, anggota reskrim, dan masyarakat di atas mengenai indikator “Kesadaran Pentingnya Koordinasi” maka terjawablah mengenai fenemona yang terjadi yaitu Tingkat pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengatasi kenakalan remaja yang masih belum maksimal, karena berdasarkan observasi di lapangan pihak kecamatan dan kepolisian sudah melakukan rapat yang di namakan dengan rapat upika, akan tetapi kegiatan tersebut tidak di laksanakan dengan rutin hanya di laksanakan berdasarkan keluhan dari masyarakat saja, begitu juga dengan pelaksanaan razia yang seharusnya di laksanakan sebulan sekali, tetapi ini hanya di lakukan jika kasus sudah banyak terjadi saja dan berdasarkan laporan dari masyarakat yang ada di kecamatan tualang. Jika kesadaran pentingnya koordinasi inidapat di laksanakan dan di terapkan dengan maksimal, maka tingkat hasil dari pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengatasi kenakalan remaja semakin bagus pula, dan semakin mudah untuk mengatasi permasalahan kenakalan ini.

3. Kompetensi SDM yang Terlibat Koordinasi

Suatu program kegiatan yang di dalamnya memerlukan koordinasi tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan dengan keterampilan, profesionalitas dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas

berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Tabel V.10 a: Diatribusi Jawaban Responden Dari Pegawai Seksi Trantib Kantor Kecamatan Tualang Tentang Indikator Kompetensi SDM yang Terlibat Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kualitas Sdm Terhadap Koordinasi	6	8	0	14
2	Kuantitas Sdm Terhadap Koordinasi	8	5	1	14
Jumlah		14	13	1	28

Sumber: Data Olahan Peneliti 2019

Berdasarkan data tabel di atas tentang tanggapan responden indikator tentang kompetensi SDM yang terlibat koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak di lihat dari item penilaian pertama yaitu kualitas SDM terhadap koordinasi di ketahui bahwa sebanyak 6 orang responden menjawab terlaksana, sebanyak 8 orang menjawab cukup terlaksana, dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 0 orang.

Selanjutnya item penilaian kedua yaitu kuantitas SDM terhadap koordinasi sebanyak 8 orang menjawab terlaksana, sebanyak 5 orang menjawab cukup terlaksana dan sebanyak 1 orang yang menjawab kurang terlaksana.

Dari hasil tanggapan responden di atas dapat di lihat bahwa untuk jawaban pada kategori “Terlaksana” jumlah responden yang memberikan tanggapannya adalah sebanyak 14 responden pegawai seksi trantib hal ini memiliki alasan yang di berikan oleh responden tersebut di mana alasannya bahwa kualitas dan kuantitas SDM dalam melaksanakan koordinasi itu sangat baik agar koordinasi ini dapat berjalan sesuai tujuan.

Selanjutnya adalah jawaban pada kategori “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden 13 responden pegawai seksi trantib, adapun alasan yang di berikan oleh pegawai kasi trantib adalah masalah kualitas SDM dan kuantitas SDM cukup bagus asalkan bisa mengerjakan tupoksi dengan baik. Sementara itu tidak ada responden yang memberikan tanggapan pada pilihan dengan kategori “Cukup Terlaksana”

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut :

Tabel V.10 b: Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Pegawai Kasi Trantib Kantor Kecamatan Tualang Tentang Indikator Kompetensi SDM yang Terlibat Koordinasi

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
		3	2	1	
1	Kualitas Sdm Terhadap Koordinasi	18	16	0	34
2	Kuantitas Sdm Terhadap Koordinasi	24	10	1	35
SKOR					69

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Skor tertinggi = $14 \times 3 = 42$

Skor indikator = $42 \times 2 = 84$

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor indikator}} \times 100 = \frac{69}{84} \times 100 = 82\%$$

Berdasarkan tabel di atas setelah di analisis menggunakan rumus maka jawaban responden mengenai kompetensi SDM yang terlibat koordinasi memperoleh hasil sebanyak 82% dengan kategori ‘Terlaksana’.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Tualang yaitu bapak Rudi Vivi Hendri, ST pada tanggal 27 september 2019 menyatakan bahwa :

“Kualitas SDM nya baik Cuma yang terkendala SDM dari masyarakatnya. Walaupun SDM nya bagaimanapun tapi kan kita ada standarnya. Sumber daya manusia itu bervariasi, walaupun sumber daya manusianya rendah tapi kita punya standar aturan main dan kalau masalah kuantitas ya normal”.

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa kompetensi SDM yang terlibat koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah cukup baik karena pihak camat dan kepolisian telah melaksanakan tugas yang di berikan dalam hal kenakalan remaja berdasarkan SOP yang ada.

Dari uraian tabel di atas, data hasil wawancara atau kuisioner serta hasil pengamatan di lapangan dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa kompetensi SDM yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi merupakan suatu program

kegiatan yang di dalamnya memerlukan koordinasi tidak akan berhasil tanpa adanya SDM yang berkualitas dan berkuantitas.

Kompetensi SDM yang terlibat koordinasi yang di lakukan oleh pihak kantor camat dan pihak polsek Tualang yaitu kualitas SDM terhadap koordinasi, kuantitas SDM terhadap koordinasi. Dalam pelaksanaan kompetensi SDM yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi yang telah di uraikan di atas walaupun masih banyak kekurangan dalam melakukan indikator kompetensi SDM yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi, akan tetapi indikator kompetensi SDM yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi menurut penulis berada pada kategori cukup terlaksana karena mereka sudah berusaha dan menjalankan tugasnya untuk mengatasi masalah kenakalan remaja yang ada di Kecamatan Tualang ini, walaupun hasil yang di peroleh belum berada pada kategori yang maksimal. Seperti ada pelaksanaan razia yang di laksanakan oleh pihak kecamatan dan kepolisian yaitu kasi trantib dengan ka unit reskrim walaupun tidak di laksanakan setiap bulannya, penyelenggaraan rapat upika yang seharusnya di laksanakan sebulan sekali tetapi ini hanya dilaksanakan berdasarkan laporan dan keluhan dari masyarakatnya saja.

Sedangkan tanggapan responden dari anggota reskrim polsek tualang tentang indikator kompetensi SDM yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak maka dapat di lihat dari tabel V.11 berikut ini :

Tabel V.11 a : Distribusi Jawaban Responden Dari Anggota Reskrim Polsek Tualang Tentang Indikator Kompetensi SDM yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kualitas Sdm Terhadap Koordinasi	7	4	0	11
2	Kuantitas Sdm Terhadap Koordinasi	6	5	0	11
Jumlah		13	9	0	22

Sumber: Data Olahan Peneliti 2019

Berdasarkan data tabel di atas tentang tanggapan responden indikator tentang kompetensi SDM yang terlibat koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dilihat dari item penilaian yang pertama yaitu kualitas SDM terhadap koordinasi diketahui bahwa sebanyak 7 orang responden menjawab terlaksana, sebanyak 4 orang menjawab cukup terlaksana, dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 0 orang.

Selanjutnya item penilaian kedua yaitu kuantitas SDM terhadap koordinasi sebanyak 6 orang menjawab terlaksana, sebanyak 5 orang menjawab cukup terlaksana dan sebanyak 0 orang yang menjawab kurang terlaksana.

Dari hasil tanggapan responden di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ketiga yang membahas kompetensi SDM yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi yaitu jawaban dengan kategori "Terlaksana" dengan jumlah 13 responden anggota reskrim adapun alasan yang

penulis dapatkan dari responden anggota reskrim tersebut adalah dalam hal kenakalan remaja maka untuk mengatasi masalah itu kami harus memiliki kualitas yang bagus dan juga harus memiliki kuantitas yang baik karena itu yang paling utama. Karena jika tidak memiliki kualitas yang bagus maka koordinasi yang di lakukan ini tidak akan memperoleh hasil. Dan kasus kenakalan remaja ini tidak akan teratasi. Jadi dalam pelaksanaan koordinasi ini terutama dalam hal mengamankan kenakalan remaja di perlukan kualitas yang baik dan juga kuantitas yang baik.

Selanjutnya di ikuti dengan jawaban dengan kategori “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden 9 responden anggota reskrim, alasan yang di berikan oleh responden anggota reskrim adalah masalah kualitas dan kuantitas dalam melakukan pekerjaan itu sudah menjadi dasar dan kewajiban bagi setiap yang menajalankan tugas. Sementara itu, tidak ada responden yang memberikan tanggapan pada pilihan dengan kategori “Kurang Terlaksana”

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang di dapat pada masing-masing jawaban responden anggota reskrim Polsek Tualang pada penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut :

Tabel V.11 b : Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Anggota Reskrim Polsek Tualang Tentang Indikator Kompetensi SDM yang Terlibat Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
		3	2	1	
1	Kualitas Sdm Terhadap Koordinasi	21	8	0	29
2	Kuantitas Sdm Terhadap Koordinasi	18	10	-	28
SKOR					57

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Skor tertinggi = $11 \times 3 = 33$

Skor indikator = $33 \times 2 = 66$

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor indikator}} \times 100 = \frac{57}{66} \times 100 = 86\%$$

Berdasarkan tabel diatas setelah di analisis menggunakan rumus maka jawaban responden mengenai kompetensi SDM yang terlibat koordinasi memperoleh hasil sebanyak 86% dengan kategori ‘Terlaksana’.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ka Unit Reskrim Brigadir Glori pada tanggal 28 september 2019 menyatakan bahwa :

“Menurut beliau, kualitasnya selaku pemberi koordinasi, pertama kita harus memberikan kebijakan atau arahan akan dampak dari kenakalan remaja. jadi kita harus benar-benar menguasai dan masalah kuantitas sesuai dengan alur”.

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa kompetensi SDM yang terlibat koordinasi yang di laksanakan oleh camat dengan kepolisian dalam

mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah terlaksana dengan baik karena untuk mengatasi kenakalan remaja ini harus menguasai dan mengetahui kebijakan dari kenakalan remaja tersebut.

Dari uraian tabel di atas, data hasil wawancara atau kuisioner serta hasil pengamatan di lapangan dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa kompetensi SDM yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi merupakan suatu program kegiatan yang di dalamnya memerlukan koordinasi yang tidak akan berhasil tanpa adanya SDM yang berkualitas dan berkuantitas.

Kompetensi SDM yang terlibat koordinasi yang di lakukan oleh pihak Kantor Camat dan pihak Polsek Tualang yaitu kualitas SDM terhadap koordinasi, kuantitas SDM terhadap koordinasi. Dalam pelaksanaan kompetensi SDM yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi yang telah di uraikan di atas walaupun masih banyak kekurangan dalam melakukan indikator kompetensi SDM yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi, akan tetapi indikator kompetensi SDM yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi menurut penulis berada pada kategori cukup terlaksana karena pihak kecamatan dan kepolisian sudah berkoordinasi dalam mengatasi kenakalan remaja dan sudah sedikit mengurangi masalah kenakalan remaja yang telah berkeliaran di kecamatan tualang secara perlahan.

Sedangkan tanggapan responden dari masyarakat tentang indikator kompetensi SDM yang terlibat koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak maka dapat di lihat dari tabel V.12 adalah sebagai berikut :

Tabel V.12 a : Distribusi Jawaban Tanggapan Responden Dari Masyarakat Tualang Tentang Indikator Kompetensi SDM yang Terlibat Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kualitas Sdm Terhadap Koordinasi	1	27	7	35
2	Kuantitas Sdm Terhadap Koordinasi	4	23	8	35
Jumlah		5	50	15	70

Sumber: Data Olahan Peneliti 2019

Berdasarkan tabel di atas tanggapan reponden tentang indikator kompetensi SDM yang terlibat koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang di nilai dari item pertama yaitu kualitas SDM terhadap koordinasi di ketahui sebanyak 1orang responden menjawab terlaksana, sebanyak 27 orang yang menjawab cukup terlaksana, dan 7 orang yang menjawab kurang terlaksana.

Pada item kedua, kuantitas SDM terhadap koordinasi sebanyak 4 orang menjawab terlaksana, sebanyak 23 orang menjawab cukup terlaksana dan 8 orang yang menjawab kurang terlaksana.

Dari hasil tanggapan responden di atas dapat di lihat bahwa untuk jawaban pada kategori “Terlaksana”jumlah responden yang memberikan tanggapan adalah sebanyak 5 responden masyarakat, hal ini memiliki alasan yang di berikan oleh responden tersebut yang alasannya adalah kualitas SDM yang dalam pelaksanaan

koordinasi ini sudah bagus karena dengan kualitas yang baik maka permasalahan yang terjadi terutama masalah kenakalan remaja bisa teratasi walaupun tidak dengan cepat.

Selanjutnya adalah jawaban pada kategori “Cukup Terlaksana” di mana jawaban pada kategori ini adalah jawaban paling dominan dengan jumlah 50 responden masyarakat, adapun alasan yang penulis dapatkan dari responden masyarakat tersebut adalah responden masyarakat mengatakan bahwa kualitas SDM dan kuantitas SDM yang melaksanakan koordinasi sudah cukup baik akan tetapi belum maksimal, sehingga masalah kenakalan remaja ini tidak teratasi dengan cepat.

Dan jawaban yang terakhir adalah dengan kategori ‘Kurang Terlaksana’ dengan jumlah responden sebanyak 15 responden masyarakat dan alasan yang di berikan oleh responden masyarakat tersebut adalah menurut mereka kualitas dan kuantitas mereka dalam mengamankan kenakalan remaja ini kurang terlaksana, di karenakan lambatnya respon dan penanganan yang di berikan terhadap masalah kenakalan remaja di kecamatan tualang.

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang di dapat pada masing-masing jawaban responden masyarakat Tualang pada penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut :

Tabel V.12 b : Analisis Distribusi Jawaban Tanggapan Responden Dari Masyarakat Tualang Tentang Indikator Kompetensi SDM yang Terlibat Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
		3	2	1	
1	Kualitas Sdm Terhadap Koordinasi	3	54	7	64
2	Kuantitas Sdm Terhadap Koordinasi	12	46	8	66
SKOR					130

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

$$\text{Skor tertinggi} = 35 \times 3 = 105$$

$$\text{Skor indikator} = 105 \times 2 = 210$$

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor indikator}} \times 100 = \frac{130}{210} \times 100 = 62\%$$

Berdasarkan tabel di atas setelah di analisis menggunakan rumus maka jawaban responden mengenai kompetensi SDM yang terlibat koordinasi, dapat di ambil kesimpulan bahwa tanggapan responden terhadap indikator kompetensi SDM yang terlibat koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten siaksebanyak 62% dengan kategori ‘Cukup Terlaksana’.

Berdasarkan data yang di peroleh peneliti setuju jika dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di kecamatan tualang kabupaten siak di katakan cukup terlaksana karena berdasarkan observasi yang di lihat dalam pelaksanaan koordinasi ini masih banyaknya di

temui kasus-kasus kenakalan remaja di Kecamatan Tualang seperti yang bolos sekolah dan ngelem, sehingga SDM yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi ini belum mampu secara maksimal mengatasi kasus tersebut, adapun jika masalah kenakalan remaja itu di tangani tetapi tidak teratasi dengan cepat.

Berdasarkan hasil analisis dari pegawai seksi trantib, anggota reskrim dan masyarakat di atas mengenai indikator “Kompetensi SDM yang Terlibat Koordinasi” yaitu mengenai kualitas SDM yang terlibat koordinasi maka terjawablah mengenai fenomena yang terjadi yaitu lambatnya penanganan dari pihak kecamatan dalam polsek Tualang dalam menangani kasus kenakalan remaja. Maksud dari lambatnya penanganan yaitu pihak camat dan kepolisian tidak langsung turun jika terdapat laporan yang di berikan masyarakat, dan kurangnya respon. Maka hasil yang di peroleh dari analisis di atas yaitu berada pada kategori cukup terlaksana, karena pihak kecamatan dengan kepolisian telah melakukan tugasnya tetapi dalam pelaksanaannya mereka masih kurang baik yaitu lambatnya penanganan yang di lakukan terhadap kasus kenakalan remaja ini. sehingga jumlah kasus kenakalan remaja yang ada di Kecamatan Tualang ini lambat berkurang.

4. Kesepakatan, Komitmen Dan Insentif Koordinasi

Kesepakatan memberikan pengaruh yang dapat membuat orang yang menjadi targetnya mengikuti dan menyetujui apa yang di tawarkan di dalam kesepakatan tersebut. Bentuk kesepakatan yang ada dapat di lihat dari rincian peraturan-peraturan, prosedur dan kebijaksanaan. Komitmen karyawan pada organisasi

sebagai ikatan kejiwaan individu terhadap organisasi yang mencakup keterlibatan kerja, kesetiaan, dan perasaan percaya terhadap nilai-nilai organisasi.

Bentuk komitmen tersebut dapat di lihat dari sejauh mana individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut bertanggungjawab melaksanakan tugas dan kewajibannya atas dasar kesepakatan yang sudah di sepakati bersama. Insentif merupakan balas jasa yang di berikan secara tidak tetap tergantung pada kondisi pencapaian prestasi kerja pegawai. Selain insentif terhadap kinerja individu di dalam organisasi atas prestasinya, terdapat juga sanksi atas kinerja individu yang tidak mencapai standar yang sudah di tetapkan. Serta pelaksanaan sistem insentif yang di lakukan untuk meningkatkan produktivitas karyawan terhadap output yang dihasilkan, yang mana insentif itu merupakan elemen atau balas jasa yang di berikan secara tidak tetap atau bersifat variabel tergantung pada kondisi pencapaian prestasi kerja karyawan.

Tabel V.13 a : Distribusi Jawaban Responden Dari Pegawai Kasi Trantib Kantor Kecamatan Tualang Tentang Indikator Kesepakatan, Komitmen Dan Insentif Koordinasi

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Ada Tidaknya Bentuk Kesepakatan	7	6	1	14
2	Ada Tidaknya Pelaksana Kegiatan	8	6	0	14
3	Ada Tidak Sanksi Pelanggar Kesepakatan	8	5	1	14
4	Ada Tidaknya Insentif Bagi Pelaksana Kesepakatan	5	8	1	14
Jumlah		28	25	3	56

Sumber : Data Olahan Peneliti 2019

Berdasarkan data tabel di atas tentang tanggapan responden indikator tentang kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang di nilai dari item pertama yaitu ada tidaknya bentuk kesepakatan ketahui bahwa ada 7 orang responden menjawab terlaksana, sebanyak 6 orang menjawab cukup terlaksana, dan sebanyak 1 orang yang menjawab kurang terlaksana. Pada item kedua, ada tidaknya pelaksana kegiatan sebanyak 8 orang menjawab terlaksana, sebanyak 6 orang menjawab cukup terlaksana, dan sebanyak 0 orang yang menjawab kurang terlaksana.

Selanjutnya pada item ke tiga yaitu sebanyak 8 orang yang menjawab terlaksana, sebanyak 5 orang menjawab cukup terlaksana dan sebanyak 1 orang yang menjawab kurang terlaksana. Dan pada item ke empat di ketahui sebanyak 5 orang menjawab terlaksana, sebanyak 8 orang menjawab cukup terlaksana, dan sebanyak 1 orang menjawab kurang terlaksana.

Dari hasil tanggapan responden diatas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke empat yang membahas tentang kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi yaitu responden yang memilih “Terlaksana” dengan jumlah 28 responden pegawai seksi trantib, di mana alasan yang penulis dapatkan untuk jawaban ini adalah mereka mengatakan bahwa kesepakatan komitmen dan insentif itu ada di dalam suatu koordinasi seperti suatu bentuk motivasi, Selanjutnya di ikuti dengan jawaban “ Cukup Terlaksana” yaitu dengan jumlah 28 responden pegawai seksi trantib, alasan yang diberikan pada kategori ini tidak jauh berbeda dengan jawaban yang telah penulis dapatkan sebelumnya,

dimana responden pegawai seksi trantib ini mengaku bahwa itu sebagai penunjang dalam melakukan pekerjaan dan sebagai penyemangat agar para anggota semangat dalam melaksanakan tugas. Dan untuk jawaban pada kategori “Kurang Terlaksana” memiliki responden yang menjawab dengan jumlah 3 responden pegawai seksi trantib. Adapun alasan yang penulis dapatkan adalah dalam pelaksanaan koordinasi ini adalah bentuk kesepakatan dalam koordinas itu ada, akan tetapi masalah insentif itu tidak di lakukan secara rutin, hanya ada saat hari-hari besar saja.

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang di dapat pada masing-masing jawaban respon pegawai kasi trantib kantor Kecamatan Tualang pada penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut :

Tabel V.13 b : Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Kasi Trantib Pegawai Kantor Kecamatan Tualang Tentang Indikator Kesepakatan, Komitmen Dan Insentif Koordinasi

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
		3	2	1	
1	Ada Tidaknya Bentuk Kesepakatan	21	12	1	33
2	Ada Tidaknya Pelaksana Kegiatan	24	12	0	36
3	Ada Tidak Sanksi Pelanggar Kesepakatan	24	10	1	34
4	Ada Tidaknya Insentif Bagi Pelaksana Kesepakatan	15	16	1	31
SKOR					134

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Skor tertinggi = $14 \times 3 = 42$

Skor indikator = $42 \times 4 = 168$

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor indikator}} \times 100 = \frac{134}{168} \times 100 = 80\%$$

Berdasarkan tabel di atas setelah di analisis menggunakan rumus maka jawaban responden mengenai kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi memperoleh hasil sebanyak 80% dengan kategori 'Terlaksana'.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Tualang yaitu bapak Rudi Vivi Hendri, ST pada tanggal 27 september 2019 menyatakan bahwa :

“Menurut beliau bentuk kesepakatan secara MOU tidak ada melainkan berdasarkan peraturan bupati no 88 tahun 2016. Sedangkan untuk sanksi beliau mengatakan bahwa tidak pernah ada yang melanggar karena semua berjalan dan bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jika pun ada maka sanksi di berikan oleh atasan masing-masing sesuai dengan aturan kepegawaian seperti adanya teguran secara lisan maupun tulisan. serta mengenai insentif beliau mengatakan ada, dengan memberikan reward yang di berikan setahun sekali”.

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi yang di laksanakan oleh camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah terlaksana dengan baik karena dalam pelaksanaan koordinasi ini berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan itu semua di kerjakan berdasarkan tupoksi masing-masing dan jika ada yang melanggar maka akan di berikan sanksi.

Dari uraian data tabel di atas, data hasil wawancara atau kuisioner serta hasil pengamatan di lapangan dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi merupakan sesuatu yang memberikan pengaruh yang di jadikan sebagai target untuk menyetujui apa yang di tawarkan dalam suatu kesepakatan, adanya sikap kesetiaan dalam menjalankan tugas serta pemberian insentif itu di gunakan untuk meningkatkan mutu kerja. Agar sdm yang ada dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi yang di lakukan oleh pihak Kecamatan dan Polsek Kecamatan Tualang yaitu ada tidaknya bentuk kesepakatan, adaitidaknya pelaksana kegiatan, ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan, dan insentif pelaksana kesepakatan. Dalam indikator ini yang telah di uraikan di atas, menurut penulis berada di kategori cukup terlaksana karena dalam pelaksanaan ini adanya sebuah kesepakatan yang di buat oleh kedua pihak dan ada nya insentif yang di berikan walaupun tidak di berikan dengan rutin. Sehingga ada sedikit motivasi yang di berikan agar sdm yang ada lebih semangat lagi dalam bekerja dan dapat menyelesaikan pekerjaan yang ada sesuai dengan target.

Sedangkan tanggapan responden dari anggota reskrim polsek tualang mengenai kesepakatan, dalam pelaksanaan koordinasi Camat dengan kepolisian dalam mengamankan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat di lihat dari tabel V.14 berikut ini :

Tabel V.14 a: Distribusi Jawaban Responden Dari Anggota Reskrim Polsek Tualang Tentang Indikator Kesepakatan, Komitmen Dan Insentif Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Ada Tidaknya Bentuk Kesepakatan	6	5	0	11
2	Ada Tidaknya Pelaksana Kegiatan	7	4	0	11
3	Ada Tidak Sanksi Pelanggar Kesepakatan	5	6	0	11
4	Ada Tidaknya Insentif Bagi Pelaksana Kesepakatan	6	2	3	11
Jumlah		24	17	3	44

Sumber : Data Olahan Peneliti 2019

Berdasarkan data tabel di atas tentang tanggapan responden indikator tentang kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang di nilai dari item pertama yaitu ada tidaknya bentuk kesepakatan ketahui bahwa ada 5 orang responden menjawab terlaksana, sebanyak 5 orang menjawab cukup terlaksana, dan sebanyak 0 orang yang menjawab kurang terlaksana. Pada item kedua, ada tidaknya pelaksana kegiatan sebanyak 7 orang menjawab terlaksana, sebanyak 3 orang menjawab cukup terlaksana, dan sebanyak 0 orang yang menjawab kurang terlaksana.

Selanjutnya pada item ke tiga yaitu sebanyak 4 orang yang menjawab terlaksana, sebanyak 6 orang menjawab cukup terlaksana dan sebanyak 0 orang yang menjawab kurang terlaksana. Dan pada item ke empat di ketahui sebanyak 6

orang menjawab terlaksana, sebanyak 1 orang menjawab cukup terlaksana, dan sebanyak 3 orang menjawab kurang terlaksana.

Dari hasil tanggapan responden diatas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke empat yang membahas tentang kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi yaitu responden yang memilih “Terlaksana” dengan jumlah 24 responden anggota reskrim., di mana alasan yang penulis dapatkan untuk jawaban ini adalah di dalam koordinasi harus ada membuat suatu kesepakatan supaya kegiatan yang di lakukan itu menjadi terarah. Dan juga harus menjalankan tugas yang di berikan dengan baik, dan masalah insentif pasti ada yang di berikan dalam berbagai bentuk.

Selanjutnya di ikuti dengan jawaban “Cukup Terlaksana” yaitu dengan jumlah 17 orang, adapun alasan yang di berikan oleh responden anggota reskrim yaitu menurut mereka kesepakatan dalam suatu koordinasi itu ada dan juga komitmen yang di miliki sudah cukup terlaksana akan tetapi belum terlaksana dengan maksimal terutama dalam hal insentif, jika pun ada tetapi itu bukan atas dasar pemberian insentif, tetapi hanya sekedar uang jalan biasa.

Dan jawaban yang terakhir adalah kategori “Kurang Terlaksana” dengan jumlah 3 responden anggota reskrim dan alasan yang di berikan oleh anggota reskrim yaitu bahwa masalah pemberian insentif itu kurang terlaksana.

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score

yang di dapat pada masing-masing jawaban responden anggota reskrimPolsek Kecamatan Tualang pada penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah:

Tabel V.14 b : Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Anggota Reskrim Polsek Tualang Tentang Indikator Kesepakatan, Komitmen Dan Insentif Koordinasi

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
		3	2	1	
1	Ada Tidaknya Bentuk Kesepakatan	18	10	0	28
2	Ada Tidaknya Pelaksana Kegiatan	21	8	0	29
3	Ada Tidak Sanksi Pelanggar Kesepakatan	15	12	0	27
4	Ada Tidaknya Insentif Bagi Pelaksana Kesepakatan	18	4	3	25
SKOR					109

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Skor tertinggi = $11 \times 3 = 33$

Skor indikator = $33 \times 4 = 132$

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor indikator}} \times 100 = \frac{109}{132} \times 100 = 83\%$$

Berdasarkan tabel diatas setelah di analisis menggunakan rumus maka jawaban responden mengenai kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi memperoleh hasil sebanyak 83% dengan kategori ‘Terlaksana’.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ka Unit Reskrim Brigadir Glori pada tanggal 28 september 2019 menyatakan bahwa :

“Menurut beliau, kesepakatan ya ada, kalau kesepakatan secara tertulis tidak ada. Cuma kebijakan, kebijakannya itu upaya kita untuk mengantisipasi kenakalan remaja ini, berdasarkan tupoksi masing-masing”.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi yang dilaksanakan oleh Camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah terlaksana dengan baik karena itu merupakan penunjang dalam menjalankan tugas.

Dari uraian data tabel di atas, data hasil wawancara atau kuisioner serta hasil pengamatan di lapangan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi merupakan sesuatu yang memberikan pengaruh yang besar dalam pelaksanaan koordinasi serta pemberian motivasi serta insentif itu diberikan untuk peningkatan kualitas kerja yang lebih baik.

Kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan Polsek Kecamatan Tualang yaitu ada tidaknya bentuk kesepakatan, ada tidaknya pelaksana kegiatan, ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan, dan insentif pelaksana kesepakatan. Dalam indikator ini yang telah diuraikan di atas, menurut penulis berada di kategori cukup terlaksana karena dalam pelaksanaan ini adanya sebuah kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak dan adanya insentif yang diberikan walaupun tidak diberikan dengan rutin.

Sedangkan tanggapan responden dari masyarakat mengenai indikator kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel V.15 a : Distribusi Jawaban Responden Dari Masyarakat Tualang Tentang Indikator Kesepakatan, Komitmen Dan Insentif Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Ada Tidaknya Bentuk Kesepakatan	4	16	15	35
2	Ada Tidaknya Pelaksana Kegiatan	7	17	11	35
3	Ada Tidak Sanksi Pelanggar Kesepakatan	5	16	14	35
4	Ada Tidaknya Insentif Bagi Pelaksana Kesepakatan	4	19	12	35
Jumlah		20	68	52	140

Sumber :Data Olahan Peneliti 2019

Berdasarkan data tabel di atas tentang tanggapan responden indikator tentang kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang di nilai dari item pertama yaitu ada tidaknya bentuk kesepakatan ketahui bahwa ada 4 orang responden menjawab terlaksana, sebanyak 16 orang menjawab cukup terlaksana, dan sebanyak 15 orang yang menjawab kurang terlaksana. Pada item kedua, ada tidaknya pelaksana kegiatan sebanyak 7 orang menjawab terlaksana, sebanyak 17 orang menjawab cukup terlaksana, dan sebanyak 11 orang yang menjawab kurang terlaksana.

Selanjutnya pada item ke tiga yaitu sebanyak 5 orang yang menjawab terlaksana, sebanyak 16 orang menjawab cukup terlaksana dan sebanyak 14 orang yang menjawab kurang terlaksana. Dan pada item ke empat di ketahui sebanyak 4

orangmenjawab terlaksana, sebanyak 19 orang menjawab cukup terlaksana, dan sebanyak 12 orang menjawab kurang terlaksana.

Dari hasil tanggapan responden di atas dapat di lihat bahwa untuk jawaban terhadap indikator ke empat pada kategori “Terlaksana” jumlah responden yang memberikan tanggapannya adalah sebanyak 20 responden masyarakat, selanjutnya yang memberikan jawaban pada kategori “Cukup Terlaksana” di mana jawaban pada kategori ini adalah jawaban paling dominan dengan jumlah responden yang menjawab adalah sebanyak 68 responden masyarakat, dan jawaban terakhir adalah dengan kategori “Kurang Terlaksana” dengan jumlah responden sebanyak 52 responden masyarakat.

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut :

Tabel V.15b : Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Masyarakat Tualang Tentang Indikator Kesepakatan, Komitmen Dan Insentif Koordinasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
		3	2	1	
1	Ada Tidaknya Bentuk Kesepakatan	12	32	15	59
2	Ada Tidaknya Pelaksana Kegiatan	21	34	11	66
3	Ada Tidak Sanksi Pelanggar Kesepakatan	15	32	14	61
4	Ada Tidaknya Insentif Bagi Pelaksana Kesepakatan	12	38	12	62
SKOR					248

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Skor tertinggi = 35X3=105

Skor indikator=105X4=420

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor indikator}} \times 100 = \frac{248}{420} \times 100 = 59\%$$

Berdasarkan tabel di atas setelah dianalisis menggunakan rumus maka jawaban responden mengenai kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi memperoleh hasil sebanyak 59% dengan kategori 'Cukup Terlaksana'.

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan di lapangan, penulis mendapatkan jawaban dari kasi trantib dan ka unit reskim dan bukti yang di tunjukkan, dan dengan demikian pula penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi yang di lakukan oleh pihak kecamatan dan kepolisian sudah cukup terlaksana.

5. Kontinuitas Perencanaan

Keberlanjutan suatu kegiatan memang sangat di butuhkan, keberlanjutan akan sesuatu hal dapat memberikan timbal balik terhadap apa yang dilaksanakan untuk perubahan lebih baik kedepannya.

Perencanaan dapat di definisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang di kerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tentukan .

Tabel V.16 a : Distribusi Jawaban Responden Dari Pegawai Seksi Trantib Kantor Kecamatan Tualang Tentang Indikator Kontinuitas Perencanaan Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Ada Tidaknya Umpan Balik	7	7	0	14
2	Pengembangan Perencanaan	5	9	0	14
Jumlah		12	16	0	28

Sumber: Data Olahan Peneliti 2019

Berdasarkan data tabel di atas tentang tanggapan responden indikator tentang kontinuitas perencanaan dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang di nilai dari item pertama yaitu ada tidaknya umpan balik di ketahui bahwa ada 7 orang responden menjawab terlaksana, sebanyak 7 orang menjawab cukup terlaksana, dan sebanyak 0 orang yang menjawab kurang terlaksana. Pada item kedua, pengembangan perencanaan sebanyak 5 orang menjawab terlaksana, sebanyak 9 orang menjawab cukup terlaksana, dan sebanyak 0 orang yang menjawab kurang terlaksana.

Dari hasil tanggapan responden di atas dapat di lihat bahwa untuk jawaban pada kategori “Terlaksana” jumlah responden yang memberi tanggapan adalah sebanyak 12 responden, hal ini memiliki alasan yang di berikan oleh responden tersebut di mana alasannya adalah bahwa dalam pelaksanaan koordinasi ini mengenai hal kenakalan remaja memperoleh umpan balik dan adanya

perkembangan yaitu dengan berkurangnya jumlah kasus kenakalan remaja yang ada di kecamatan tualang ini.

Selanjutnya adalah jawaban pada kategori “Cukup Terlaksana” di mana jawaban pada kategori ini adalah jawaban yang paling dominan dengan jumlah responden yang menjawab adalah sebanyak 16 responden pegawai seksi trantib, adapun alasan yang di berikan adalah menurut mereka masalah umpan balik itu ada tetapi hanya bersifat sementara, seperti hilang satu kasus dan timbul kasus yang baru. Dan mereka selalu berusaha untuk mengatasi permasalahan kenakalan remaja yang ada di Kecamatan Tualang. Dan jawaban yang terakhir yaitu “Kurang Terlaksana” dengan jumlah responden sebanyak 0 responden.

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang di dapat pada masing-masing jawaban responden pegawai seksi trantib, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut :

Tabel V.16 b : Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Pegawai Kasi Trantib Kantor Kecamatan Tualang Tentang Indikator Kontinuitas Perencanaan Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
		3	2	1	
1	Ada Tidaknya Umpan Balik	21	14	0	35
2	Pengembangan Perencanaan	15	18	0	33
SKOR					68

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Skor tertinggi = $14 \times 3 = 42$

Skor indikator = $42 \times 2 = 84$

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor indikator}} \times 100 = \frac{68}{84} \times 100 = 81\%$$

Berdasarkan tabel di atas setelah di analisis menggunakan rumus maka jawaban responden mengenai kontinuitas perencanaan memperoleh hasil sebanyak 81% dengan kategori ‘Terlaksana’.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Trantib Rudi Vivi Hendri S.T pada tanggal 28 september 2019 menyatakan bahwa :

“Dari pelaksanaan koordinasi ini terutama dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang kita ada memperoleh hasil berupa umpan balik yaitu dengan berkurangnya kasus-kasus kenakalan remaja di kecamatan tualang ini”.

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa kontinuitas perencanaan yang di laksanakan oleh camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah terlaksana dengan baik karena adanya umpan balik yang di peroleh dari hasil koordinasi ini dengan berkurangnya kasus kenakalan remaja.

Dari uraian data tabel di atas, data hasil wawancara atau kuisioner serta hasil pengamatan di lapangan dapat di tarik kesimpulan bahwa kontinuitas perencanaan merupakan suatu hal yang di butuhkan serta keberlanjutan akan

sesuatu hal dapat memberikan timbal balik terhadap apa yang telah di laksanakan untuk suatu perubahan yang baik.

kontinuitas perencanaan yang di lakukan oleh pihak kecamatan dan polsek Tualang yaitu umpan balik, dan pengembangan perencanaan. Pelaksanaan koordinasi yang di lakukan oleh camat dengan kepolisian dalam melakukan kontinuitas perencanaan yang telah di uraikan di atas, walaupun masih belum terlaksana dengan maksimal akan tetapi indikator kontinuitas perencanaan menurut penulis berada pada kategori cukup terlaksana, karena mereka telah menjalankan tugasnya dan berusaha untuk mengatasi dan mengurangi kasus kenakalan remaja yang ada di Kecamatan Tualang ini.

Sedangkan tanggapan responden dari anggota reskrim Polsek Tualang mengenai kontinuitas perencanaan dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak maka dapat dilihat dari tabel V.17 berikut ini :

Tabel V.17 a : Distribusi Jawaban Responden Dari Anggota Reskrim Polsek Tualang Tentang Indikator Kontinuitas Perencanaan Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Ada Tidaknya Umpan Balik	9	2	0	11
2	Pengembangan Perencanaan	7	4	0	11
Jumlah		16	6	0	22

Sumber: Data Olahan Penulis 2019

Berdasarkan data tabel di atas tentang tanggapan responden indikator tentang kontinuitas perencanaan dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang di nilai dari item pertama yaitu ada tidaknya umpan balik di ketahui bahwa ada 9 orang responden menjawab terlaksana, sebanyak 2 orang menjawab cukup terlaksana, dan sebanyak 0 orang yang menjawab kurang terlaksana.

Pada item kedua, pengembangan perencanaan sebanyak 7 orang menjawab terlaksana, sebanyak 4 orang menjawab cukup terlaksana, dan sebanyak 0 orang yang menjawab kurang terlaksana.

Dari hasil tanggapan responden diatas dapat di lihat bahwa untuk jawaban pada kategori “Terlaksana” jumlah responden yang memberi tanggapannya adalah sebanyak 16 responden hal ini memiliki alasan yang di berikan oleh responden tersebut di mana alasannya adalah menurut responden kontinuitas perencanaan ini sudah terlaksana yaitu dengan adanya umpan balik yang di peroleh sehingga permasalahan kenakalan remaja ini akan berangsur hilang.

Selanjutnya adalah jawaban pada kategori “Cukup Terlaksana” dimana jawaban responden berjumlah 6 responden adapun alasan yang di berikan adalah sama seperti sebelumnya yaitu dalam pelaksanaan koordinasi untuk mengatasi kenakalan remaja ini pasti memperoleh umpan balik, karena itu adalah salah satu tujuan dalam mengatasi kenakalan remaja sehingga tidak ada lagi remaja yang

melakukan penyimpangan. Sementara itu, tidak ada responden yang memberikan tanggapan pada pilihan dengan kategori jawaban ‘Kurang Terlaksana’.

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang di dapat pada masing-masing jawaban responden anggota ReskrimPolsek Kecamatan Tualang pada penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut :

Tabel V.17 b : Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Anggota Reskrim Polsek Tualang Tentang Indikator Kontinuitas Perencanaan Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
		3	2	1	
1	Ada Tidaknya Umpan Balik	27	4	0	31
2	Pengembangan Perencanaan	21	8	0	29
SKOR					60

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Skor tertinggi = $11 \times 3 = 33$

Skor indikator = $33 \times 2 = 66$

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor indikator}} \times 100 = \frac{60}{66} \times 100 = 91\%$$

Berdasarkan tabel di atas setelah di analisis menggunakan rumus maka jawaban responden mengenai kontinuitas perencanaan memperoleh hasil sebanyak 91% dengan kategori ‘Terlaksana’.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ka Unit Reskrim Brigadir Glori pada tanggal 28 september 2019 menyatakan bahwa :

“Menurut beliau, hasilnya ada, kita sudah melakukan upaya dengan memberikan motivasi kepada remaja untuk menjauh dari kenakalan remaja, agar kecamatan tualang ini jauh dari hal yang negatif”.

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa kontinuitas perencanaan yang di laksanakan oleh Camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah terlaksana dengan baik karena adanya umpan balik yang di peroleh dari hasil koordinasi ini walaupun itu hanya bersifat sementara untuk memperoleh itu maka di lakukan upaya-upaya agar remajayangada di Kecamatan Tualang terhindar dari kenakalan remaja.

Bedasarkan hasil observasi atau pengamatan yang penulis lakukan di lokasi penelitian serta data yang di berikan oleh responden dari indikator kontinuitas perencanaan. Sesuai dengan yang peneliti jumpai di lapangan bahwa masih di temui kasus kenakalan remaja yang terjadi di kecamatan tualang ini seperti masih ada di temuinya anak-anak yang ngelem, bolos sekolah, bermain di warnet di jam sekolah. Seharusnya pelaksanaan razia harusnya di lakukan peningkatan. Dan jika ada yang tertangkap harus di berikan hukuman yang membuat mereka jera agar tidak melakukan hal tersebut lagi.

Dari uraian data tabel di atas, data hasil wawancara atau kuisisioner serta hasil pengamatan di lapangan dapat di tarik kesimpulan bahwa kontinuitas perencanaan merupakan suatu kegiatan yang di lakukan secara bersama dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

kontinuitas perencanaan yang di lakukan oleh pihak kecamatan dan polsek Tualang yaitu umpan balik, dan pengembangan perencanaan. Pelaksanaan koordinasi yang di lakukan oleh camat dengan kepolisian dalam melakukan kontinuitas perencanaan yang telah di uraikan di atas, walaupun masih belum terlaksana dengan maksimal akan tetapi indikator kontinuitas perencanaan menurut penulis berada pada kategori cukup terlaksana, karena mereka telah menjalankan tugasnya dan berusaha untuk mengatasi kenakalan remaja yang ada di Kecamatan Tualang ini.

Sedangkan tanggapan responden dari masyarakat tualang mengenai kontinuitas perencanaan dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak maka dapat dilihat dari tabel V.18 berikut ini :

Tabel V.18 a : Distribusi Jawaban Responden Dari Masyarakat Tualang Tentang Indikator Kontinuitas Perencanaan Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Ada Tidaknya Umpan Balik	5	21	9	35
2	Pengembangan Perencanaan	3	23	9	35
Jumlah		8	44	18	70

Sumber: Data Olahan Penulis 2019

Berdasarkan data tabel di atas tentang tanggapan responden indikator tentang kontinuitas perencanaan dalam pelaksanaan koordinasi camat dengan

kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang di nilai dari item pertama yaitu ada tidaknya umpan balik di ketahui bahwa ada 5 orang responden menjawab terlaksana, sebanyak 21 orang menjawab cukup terlaksana, dan sebanyak 9 orang yang menjawab kurang terlaksana.

Pada item kedua, pengembangan perencanaan sebanyak 3 orang menjawab terlaksana, sebanyak 23 orang menjawab cukup terlaksana, dan sebanyak 9 orang yang menjawab kurang terlaksana.

Dari hasil tanggapan responden di atas dapat di lihat bahwa untuk jawaban pada kategori “Terlaksana” jumlah responden yang memberikan tanggapannya adalah sebanyak 8 orang responden, hal ini memiliki alasan yang di berikan oleh responden tersebut dimana alasannya adalah menurut responden dalam pelaksanaan koordinasi yang di lakukan oleh camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja ini perkembangan yang di hasilkan sangat memuaskan dapat di lihat dari mulai berkurangnya kasus kenakalan remaja yang ada di kecamatan ini, serta camat dan kepolisian ini selalu berupaya untuk mengatasi kenakalan remaja ini.

Selanjutnya adalah jawaban pada kategori “Cukup Terlaksana” di mana jawaban dari kategori ini adalah jawaban yang paling dominan dengan jumlah responden yang menjawab adalah sebanyak 44 responden masyarakat. Adapun alasan yang di berikan oleh responden tersebut menurut responden umpan balik yang di terima yaitu cukup terlaksana karena masih banyak juga terdapat

kenakalan-kenakalan lainnya. Dan jawaban yang terakhir adalah dengan kategori “Kurang Terlaksana” mereka mengatakan bahwa kurang merasakan umpan balik dan perkembangan dari masalah kenakalan remaja ini yang di koordinasikan oleh camat dengan kepolisian. Karena mereka merasakan kasus kenakalan remaja itu tidak kunjung berkurang.

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang di dapat pada masing-masing jawaban responden masyarakat tualang pada penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut :

Tabel V.18 b : Analisis Distribusi Jawaban Responden Dari Masyarakat Tualang Tentang Indikator Kontinuitas Perencanaan Dalam Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
		3	2	1	
1	Ada Tidaknya Umpan Balik	15	42	9	66
2	Pengembangan Perencanaan	9	46	9	64
SKOR					130

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

$$\text{Skor tertinggi} = 35 \times 3 = 105$$

$$\text{Skor indikator} = 105 \times 2 = 210$$

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor indikator}} \times 100 = \frac{130}{210} \times 100 = 62\%$$

Berdasarkan tabel di atas setelah dianalisis menggunakan rumus maka jawaban responden mengenai kontinuitas perencanaan memperoleh hasil sebanyak 62% dengan kategori ‘Cukup Terlaksana’.

Berdasarkan observasi di lapangan mengenai pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang di ukur dengan indikator kontinuitas perencanaan belum terlaksana dengan maksimal , karena umpan balik yang di peroleh oleh masyarakat hanya bersifat sementara. Dan masih banyak juga kasus kenakalan remaja yang dapat meresahkan masyarakat seperti anak-anak sekolah yang bolos pada jam sekolah mereka melakukan hal-hal yang berdampak negatif yang bisa menyebabkan kerusuhan. Dan masih banyak juga di temui anak-anak yang menghisap lem.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan pendapat dari responden dalam indikator kontinuitas perencanaan yaitu “Cukup Terlaksana”.

Berdasarkan hasil analisis dari pegawai seksi trantib, anggota reskrim, dan masyarakat di atas mengenai indikator “Kontinuitas Perencanaan” maka terjawablah mengenai fenomena yang terjadi yaitu masih adanya di temui kasus kenakalan remaja yang ada di kecamatan tualang, bahwa indikator kontinuitas perencanaan belum terlaksana secara maksimal, dan berada pada indikator cukup terlaksana, karena masih terdapat dan masih di temui kasus kenakalan tersebut,

seperti ngelem, bermain di warnet di jam sekolah yang terdapat di desa tualang. Adapun umpan balik yang di peroleh dari pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di kecamatan tualang kabupaten siak ini hanya bersifat sementara, dan munculnya kembali kasus-kasus yang baru.

6. Rekapitulasi Jawaban Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil penulis lakukan di masing-masing indikator di atas yang mana di antaranya adalah indikator yang pertama yang membahas tentang “komunikasi” kemudian indikator kedua adalah “kesadaran pentingnya koordinasi” indikator ke tiga” kompetensi SDM yang terlibat koordinasi” indikator ke empat “ kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi “dan indikator yang ke lima “ kontinuitas perencanaan”, dan di dukung dengan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan yaitu di Kantor Kecamatan Tualang Dan Polsek Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang di tentukan oleh penulis.

Dari pelaksanaan penelitian dan observasi yang penulis lakukan di atas, penulis menemukan fakta bahwa pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum terlaksana secara maksimal.

Untuk melihat hasil dari keseluruhan indikator-indikator yang penulis gunakan di dalam melakukan penelitian ini yang di kategorikan ke dalam masing-masing sub indikator atau item penilaian, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan penjelasan di bawah ini :

Tabel V.19 : Rekapitulasi Analisis Tanggapan Responden Dari Pegawai Seksi Trantib Kantor Kecamatan Tualang Mengenai Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

No	Variabel	Indikator	Persentase
1	Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	Komunikasi	83 %
2		Kesadaran Pentingnya Koordinasi	82%
3		Kompetensi SDM Yang Terlibat Koordinasi	82%
4		Kesepakatan, Komitmen, Dan Insentif Koordinasi	80%
5		Kontinuitas Perencanaan	81%
TOTAL			408%
Rata-Rata			82%

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Dari hasil tanggapan di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap ke lima indikator yaitu, komunikasi, kesadara pentingnya koordinasi, kompetensi SDM yang terlibat koordinasi, kesepakatan komitmen dan insentif koordinasi, serta kontinuitas perencanaan, yang di berikan oleh responden “ Pegawai Seksi Trantib Kantor Kecamatan Tualang” kepada penulis adalah jawaban dengan kategori “ Terlaksana” di mana hasil ini di dapatkan dari penyebaran kuesioner yang di lakukan di Kantor Kecamatan Tualang dan Polsek Kecamatan Tualang jawaban yang di berikan oleh responden tersebut memiliki persentase mencapai angka 82% dari total keseluruhan jumlah responden pegawai kantor Kecamatan Tualang yaitu 14 orang responden.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil rekapitulasi yang penulis dapatkan dari penyebaran kuesioner terhadap anggota Reskrim Polsek Kecamatan

Tualang yang penulis pilih sebagai tempat penelitian, adapun hasil rekapitulasi yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut :

Tabel V.20 : Rekapitulasi Analisis Tanggapan Responden Dari Anggota Reskrim Polsek Tualang Menganai Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

No	Variabel	Indikator	Persentase
1	Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	Komunikasi	93%
2		Kesadaran Pentingnya Koordinasi	90%
3		Kompetensi SDM Yang Terlibat Koordinasi	85%
4		Kesepakatan, Komitmen, Dan Insentif Koordinasi	85%
5		Kontinuitas Perencanaan	91%
TOTAL			444%
Rata-Rata			89%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2019

Dari hasil tanggapan di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap ke lima indikator yaitu, komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi SDM yang terlibat koordinasi, kesepakatan komitmen dan insentif koordinasi, serta kontinuitas perencanaan, yang di berikan oleh responden “ Anggota Reskrim Polsek Kecamatan Tualang” kepada penulis adalah jawaban dengan kategori “ Terlaksana” di mana hasil ini di dapatkan dari penyebaran kuesioner yang di lakukan di Kantor Polsek Kecamatan Tualang yang penulis jadikan lokasi penelitian, dan jawaban yang di berikan oleh responden tersebut memiliki persentase mencapai angka 89% responden anggota Reskrim Polsek Kecamatan Tualang dari total keseluruhan jumlah responden anggota reskrim polsek kecamatan tualang yaitu 11 orang responden.

Tabel V.21 :Rekapitulasi Analisis Tanggapan Responden Dari Masyarakat Tualang Mengenai Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

No	Variabel	Indikator	Persentase
1	Pelaksanaan Koordinasi Camat Dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	Komunikasi	63%
2		Kesadaran Pentingnya Koordinasi	62%
3		Kompetensi SDM Yang Terlibat Koordinasi	62%
4		Kesepakatan, Komitmen, Dan Insentif Koordinasi	59%
5		Kontinuitas Perencanaan	62%
TOTAL			308%
Rata-Rata			62%

Sumber :Data Olahan Penulis 2019

Dari hasil tanggapan di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap ke lima indikator yaitu, komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi SDM yang terlibat koordinasi, kesepakatan komitmen dan insentif koordinasi, serta kontinuitas perencanaan, yang diberikan oleh responden “ Masyarakat Kecamatan Tualang” kepada penulis adalah jawaban dengan kategori “ Cukup Terlaksana” dengan hasil 62% responden masyarakat Kecamatan Tualang dari total keseluruhan jumlah responden masyarakat Kecamatan Tualang yaitu 35 orang responden.

Dari hasil observasi dan penyajian hasil rekapitulasi yang telah penulis sajikan di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa jawaban yang diberikan oleh pihak Kantor Kecamatan Tualang dan pihak Kantor Polsek Kecamatan Tualang Kabupaten Siak memang memiliki kesimpulan yang mengatakan bahwa pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah terlaksana dengan baik,

menurut penulis, hal ini tentunya sangat wajar apabila mendapatkan jawaban demikian, karena pada dasarnya pihak Kantor Kecamatan Tualang dan pihak Kantor Polsek Tualang tentunya tidak akan mau memberikan jawaban di luar jawaban tersebut, karena dampaknya tentu akan memberikan citra yang buruk terhadap kantor mereka sendiri, dan untuk menemukan jawaban yang bisa di jadikan patokan pada penelitian ini adalah jawaban yang di berikan oleh responden yang berasal dari masyarakat yang penulis jadikan sampel responden.

Dan jawaban yang di berikan oleh responden masyarakat adalah “Cukup Terlaksana”, hal ini tentunya beralasan karena pada pelaksanaannya camat dan kepolisian telah melakukan beberapa upaya dalam mengamankan kenakalan remaja yang ada di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tetapi masih belum terlaksana secara maksimal.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang di peroleh dari pegawai seksi trantib, anggota reskrim, dan masyarakat tualang tentang pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di kecamatan tualang kabupaten siak terhadap indikator koordinasi maka dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi yang di lakukan camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja belum terlaksana dengan baik. di karenakan masih banyak terdapat kasus kenakalan yang terjadi di kecamatan tualang terutama di desa tualang, yaitu masih banyaknya anak-anak yang bolos pada jam sekolah, sehingga ada terjadinya tawuran, bermain diwarnet, hingga masih banyak juga anak-anak yang di temui menghisap lem. Lambatnya penanganan yang di lakukan pihak kecamatan dan kespolisian dalam menangani kasus kenakalan

remaja ini. Kurangnya kesadaran koordinasi seperti kegiatan rapat yang tidak rutin di laksanakan, kegiatan razia dan patroli yang hanya di laksanakan berdasarkan laporan dari masyarakat saja, yang seharusnya di lakukan sekali dalam sebulan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kecamatan tualang merupakan kecamatan yang memiliki kasus kenakalan remaja yang sangat memperhatikan dikecamatan siak, dikarenakan kecamatan tualang memiliki penduduk terpadat sekabupaten siak. Sehingga banyak di temui nya kasus-kasus kenakalan remaja seperti masih banyaknya di temui anak yang bolos sekolah, bermain warnet pada jam sekolah, tawuran, hingga terdapat anak yang ngelem dan juga mengkonsumsi komik serta torpedo.

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di kecamatan tualang kabupaten siak dapat di simpulkan pada kategori untuk pegawai Seksi Trantib Kantor Kecamatan Tualang berada pada kategori terlaksana, karena mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik dan dapat mengatasi kasus kenakalan remaja yang ada di kecamatan tualang ini walaupun hanya bersifat sementara seperti sudah melakukan razia khusus untuk remaja. Selanjutnya untuk anggota Reskrim Polsek Kecamatan Tualang berada pada kategori terlaksana, mereka mengatakan bahwa mereka sudah berusaha untuk mengatasi kenakalan remaja yang ada di kecamatan tualang dengan pemberian sosialisasi kepada remaja-remaja, adanya pemberian motivasi hingga melakukan rapat bulanan yang di laksanakan oleh camat dengan kepolisian jika sudah banyak kasus terjadi. Dan untuk masyarakat Kecamatan Tualang berada pada kategori cukup terlaksana, mereka mengatakan

bahwa kasus kenakalan remaja yang ada di kecamatan tualang ini belum bisa teratasi oleh pihak kecamatan sehingga membuat masyarakat menjadi resah dan takut jika anak tersebut dapat memengaruhi anak yang lainnya. Maka dapat di jelaskan berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan dapat di ketahui pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum terlaksana dengan baik. karena berdasarkan hasil di lapangan pihak kecamatan dan kepolisian lambat dalam memberikan penanganan sehingga kasus kenakalan remaja yang ada di kecamatan tualang ini masih banyak yang merajalela.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memiliki saran yang di usulkan dalam penelitian ini di antaranya adalah :

1. Di harapkan kepada pihak kecamatan dan kepolisian semoga dalam mengamankan kenakalan remaja di kecamatan tualang lebih meningkatkan dalam pelaksanaan razia khusus untuk mengatasi kenakalan remaja, hingga meningkatkan pemberian sosialisasi serta motivasi khusus untuk remaja-remaja yang terdapat di kecamatan tualang mengenai kasus kenakalan remaja.
2. Di harapkan kepada pihak kecamatan dan kepolisian dapat merespon dengan cepat mengenai laporan yang di berikan oleh masyarakat mengenai kasus-kasus kenakalan remaja yang ada di kecamatan tualang ini, supaya kasus kenakalan remaja ini dapat teratasi dengan cepat

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas, 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung. Alfabeta
- Gomes, Cardoso Faustino. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Hamali, Arif Yusuf dan Eka Sari Budihastuti. 2018. *Pemahaman praktis administras, organisasi, dan manajemen*. Bandung; kencana
- Herlambang, Susatyo. 2013. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Gosenpublishing
- Hasibuan,. 2015. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta ; Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kusdi. 2011. *Teori Organisasi Dan Administrasi*. Jakarta ; Salemba Humanika
- Manullang. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta ; Gadjah Mada University Press
- Reksohadiprojo, Sukanto. 1996. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta ; BPFE-Yogyakarta
- Robbins, Stephen. 1994. *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*. Jakarta
- Siagian, Sondang. P., 2006. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta ; Bumi Aksara
- Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta : C.V Andi Offset
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung; CV. Mandar Maju
- Supomo. 2018. *Pengantar Manajemen*. Bandung; Yrama Widya
- Sutarto, 2006. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta ; Gajah Mada University Press
- Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Kencana
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung ; Pustaka Reka Cipta

Syafiie, Kencana Inu. 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Bandung : Bumi Aksara

Syafri,Wirman.2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar.2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta ; Bumi Aksara

Zulkifli, Awang, Azam., dkk. 2013. *Buku Panduan Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, dan, Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol UIR.

Dokumen :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002

